

**EFEKTIVITAS PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA
TUNAGRAHITA DALAM KONSEP *SUSTAINABLE DEVELOPMENT*
GOALS DI DESA KARANGPATIHAN KECAMATAN BALONG
KABUPATEN PONOROGO**

TESIS



Oleh :

LINATUL CHARIRO

NIM 501210013

**PROGRAM MAGISTER
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO**

2023

**EFEKTIVITAS PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA
TUNAGRAHITA DALAM KONSEP *SUSTAINABLE DEVELOPMENT*
GOALS DI DESA KARANGPATIHAN KECAMATAN BALONG
KABUPATEN PONOROGO**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena sejumlah 96 warga di Desa Karangpatihan yang berstatus penyandang keterbelakangan mental atau tunagrahita yang masih ketergantungan kepada bantuan konsumtif, sehingga masih sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. padahal sudah dilakukan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga tunagrahita untuk memandirikan masyarakat sejak tahun 2013. Adapun kendala-kendala yang menghambat keberhasilan pemberdayaan tersebut adalah sulitnya komunikasi dua arah antara pemberdaya dengan warga tunagrahita. Selain itu kurangnya semangat atau kemauan dari diri warga tunagrahita juga berpotensi menyebabkan program pemberdayaan ekonomi ini menjadi kurang efektif.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian merupakan jenis data primer dan sekunder, sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) menganalisis pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat tunagrahita, (2) menganalisis faktor penghambat dan pendorong pemberdayaan ekonomi keluarga tunagrahita serta dampak pemberdayaan dalam meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga tunagrahita, (3) menganalisis efektivitas pemberdayaan ekonomi keluarga tunagrahita dalam konsep *Sustainable Development Goals* di desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

Temuan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: 1) Pelaksanaan pemberdayaan ekonomi keluarga tunagrahita dilakukan di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Rumah Harapan Mulya dengan melakukan berbagai kegiatan, seperti pelatihan, keterampilan, serta pembinaan. Dalam pelaksanaan pemberdayaan terdapat kendala yang dihadapi yakni komunikasi dan kemauan dari warga tunagrahita. 2) Dengan pelatihan tersebut warga tunagrahita mempunyai kegiatan dan keterampilan yang dapat menghasilkan pendapatan. dengan 3 konsep, yakni harian, triwulan, dan tahunan. 3) Berdasarkan pengukuran efektivitas dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan pencapaian tujuan, pendekatan integrasi, dan pendekatan adaptasi, pelaksanaan pemberdayaan ekonomi keluarga tunagrahita dalam meningkatkan konsep *Sustainable Development Goals* di desa Karangpatihan berjalan cukup efektif. Dengan adanya kegiatan pemberdayaan memberikan implikasi kepada warga tunagrahita yakni: mempunyai pendapatan, memiliki kemampuan mobilitas, serta memiliki partisipasi dalam kehidupan sosial.

Kata Kunci: Efektivitas, Pemberdayaan Ekonomi, *Sustainable Development Goals*.

THE EFFECTIVENESS OF ECONOMIC EMPOWERMENT OF GRAPHIC FAMILIES IN THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS IN KARANGPATIHAN, BALONG, PONOROGO

ABSTRACT

This research was motivated by the phenomenon of a number of 96 residents in Karangpatihan Village who were mentally retarded or mentally retarded who were still dependent on consumer assistance, making it difficult to fulfill their daily needs. even though efforts have been made to economically empower mentally retarded families to make the community self-reliant since 2013. The obstacles that hinder the success of this empowerment are the difficulty of two-way communication between empowerers and mentally retarded residents. Apart from that, the lack of enthusiasm or will on the part of mentally retarded residents also has the potential to cause this economic empowerment program to be less effective.

This research is a type of field research using a qualitative approach. The data used in the research are primary and secondary data, while the data sources used in this research come from interviews, observations and documentation.

The aim of this research is to (1) analyze the implementation of economic empowerment for mentally retarded communities, (2) analyze the inhibiting and driving factors for the economic empowerment of mentally retarded families and the impact of empowerment in increasing the economic income of mentally retarded families, (3) analyze the effectiveness of economic empowerment for mentally retarded families in the concept of Sustainable Development Goals in Karangpatihan Village, Balong District, Ponorogo Regency.

The findings obtained in this research are: 1) Implementation of economic empowerment for mentally retarded families is carried out at the Rumah Harapan Mulya Social Welfare Institution (LKS) by carrying out various activities, such as training, skills and coaching. In implementing empowerment, there are obstacles faced, namely communication and the will of mentally retarded residents. 2) With this training, mentally retarded residents have activities and skills that can generate income. with 3 concepts, namely daily, quarterly and annual. (3) Based on measuring effectiveness using three approaches, namely the goal achievement approach, integration approach, and adaptation approach, the implementation of economic empowerment for mentally retarded families in improving the concept of Sustainable Development Goals in Karangpatihan village is running quite effectively. The implications of this empowerment are that mentally retarded residents have income, have mobility abilities, and participate in social life.

Keywords: Effectiveness, Economic Empowerment, Sustainable Development Goals.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

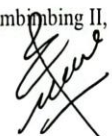
Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh Linatul Chariro, NIM 501210013 dengan judul: *“Efektivitas Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Tunagrahita Dalam Konsep Sustainable Development Goals Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo”* maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang Majelis Munâqashah Tesis.

Pembimbing I,


Dr. Aji Damanuri, M.E.I
NIP 197506022002121003

Ponorogo, 2 Oktober 2023

Pembimbing II,


Dr. Ely Masykuroh, S.E., M.S.I.
NIP 197202111999032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA

Terakreditasi B Sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016
Alamat: Jln. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893
Website: www.iainponorogo.ac.id Email: pascasarjana@iainponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh Linatul Chariro, NIM 501210013 Program Magister Program Studi Ekonomi Syariah dengan judul: *"Efektivitas Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Tunagrahita Dalam Konsep Sustainable development Goals di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo"*, telah dilakukan ujian tesis dan sidang Majelis *Munāqasah* Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada Hari Selasa, 24 Oktober 2023 dan dinyatakan LULUS.

Dewan Penguji

| No | Nama Penguji | Tandatangan | Tanggal |
|----|---|-------------|------------|
| 1 | Nur Kolis, Ph.D. NIP 197106231998031002 Ketua Sidang | | 16/11/2023 |
| 2 | Dr. Amin Wahyudi, S.Ag., M.Ei. NIP 197502072009011007 Penguji Utama | | 15-11-23 |
| 3 | Dr. Aji Damanuri, M.E.I NIP 197506022002121003 Penguji II | | 15-11-23 |
| 4 | Dr. Hj. Ely Masykuroh, S.E., M.S.I. NIP 197202111999032003 Sekretaris | | 16-11-23 |

Ponorogo, 15 November 2023
Direktur Pascasarjana,



Dr. Muh. Tasrif, M.Ag
NIP 197401081999031001

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Linatul Chariro
NIM : 501210013
Fakultas : Pascasarjana
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi/Tesis : Efektivitas Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Tunagrahita Dalam Konsep *Sustainable Development Goals* Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi/ tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Ponorogo, 15 November 2023
Penulis



Linatul Chariro
NIM 501210013

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, Saya Linatul Chariro, NIM 501210013, Program Magister Prodi Ekonomi Syariah menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan Judul: **“Efektivitas Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Tunagrahita Dalam Konsep *Sustainable Development Goals* Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo”** ini merupakan hasil karya saya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk dimana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila dikemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 2 Oktober 2023

Pembuat pernyataan,


METERAI
TEMPEL
E E E C A K X 5 9 5 4 7 9 4 6 3
Linatul Chariro
NIM 5012100013


P O N O R O G O

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masa sekarang dikenal sebagai era pengembangan dan pembangunan, setiap individu diharuskan untuk bisa mengadaptasikan diri.¹ Pembangunan di Indonesia sendiri dilandasi oleh semangat konstitusi dan cita-cita pendiri bangsa, filosofi pembangunan Indonesia tercantum dalam UUD 45 baik pada isi ataupun batang tubuh.² Dalam konteks pembangunan ekonomi, Indonesia digolongkan sebagai negara berkembang yang memiliki tingkat kemakmuran yang masih rendah apabila dibandingkan dengan negara-negara maju.³ Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengimplementasikan *Sustainable Development Goals* dengan mengadopsi hasil kesepakatan *Sustainable Development Goals* melalui prinsip Nawa Cita yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah negara (RPJMN) 2015-2019.⁴ Komitmen pemerintah dalam pembangunan berkelanjutan sudah dimulai sejak lama. Yakni ditandai dengan komitmen pemerintah melanjutkan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005- 2009 serta program pemerintah lainnya.⁵

¹ Maria Yasinta Serena, Upaya Mengatasi Kemiskinan Desa Melalui Program Sustainable Development Goals (SDGs) (Studi Pada Kantor Desa Karang Bnayan Kecamatan Langsar Kab. Lombok Barat) Skripsi, FISPOL Univ. Muhammadiyah Mataram 2022. 1.

² Zaki Arianto, *Upaya Pemerintahan Joko Widodo Dalam Mendorong Implementasi Sustainable Development Goals Di Indonesia*. Univ. Muhammadiyah Yogyakarta, 1.

³ Muhammad Fardan Ngoyo, Mengawal Sustainable Development Goals (SDGs); Meluruskan orientasi pembangunan yang berkeadilan, *Jurnal Sosioreligius* Vol. 1 No. 1 Juni 2015, 1.

⁴ Zaki Arianto, *Upaya Pemerintahan Joko Widodo Dalam Mendorong Implementasi Sustainable Development Goals Di Indonesia*. 2.

⁵ *Ibid.*, 3.

Sustainable Development Goals merupakan inisiatif global yang bertujuan menciptakan kehidupan manusia menjadi lebih baik dalam aspek sosial dan ekonomi serta dapat bersinergi dengan lingkungan.¹ Konsep SDGs ini diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi setelah tahun 2015 menggantikan *Millennium Development Goals* (MDGs).² Kerangka kerja atau pondasi dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) berlaku selama 15 tahun yakni dimulai dari tahun 2015 hingga berakhir pada tahun 2030.³ Konsep pembangunan berkelanjutan disusun berdasarkan beberapa dimensi diantaranya merupakan dimensi kelembagan, ekonomi, lingkungan dan juga dimensi sosial. Didalam tujuannya maka SDGs memiliki 17 tujuan dan sejumlah indikator untuk pengukurannya.⁴ Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih dijelaskan bahwa isu mengenai sumber daya alam, kerusakan lingkungan, ketahanan pangan, perlindungan sosial dan juga kemiskinan masih menjadi persoalan serius bagi penerapan SDGs.⁵

Didalam tujuannya penghapusan kemiskinan menjadi tujuan pertama SDGs. Dari tujuan tersebut juga dapat dilihat bahwa negara didunia sepakat bahwa kemiskinan harus dihapuskan.⁶ Lebih lanjut dalam penelitian yang dilakukan oleh

¹ Panuluh, S dan M. R.Fitri. 2016. *Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia*. Diakses di www.infid.org pada 30 Maret 2022.

² Wahyuningsih, W. 2018. Millenium Development Goals (MDGS) dan Sustainable Development Goals (SDGS) Dalam Kesejahteraan Sosial. *Bisma*, 11(3), 390-399.

³ Nanda Bhayu Pratama, Eko Priyo Purnomo, Agustiyara, *Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Sosiohumaniora* Vol. 6 (2), Agustus 2020, LP3M Univ. Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta, 64.

⁴ Retno Setianingsih, *Pemodelan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 2019, 27(2)

⁵ Wahyuningsih, W. 2018. Millenium Development Goals (MDGS) dan Sustainable Development Goals (SDGS) Dalam Kesejahteraan Sosial. *Bisma*, 395.

⁶ Nanda Bhayu Pratama, Eko Priyo Purnomo, Agustiyara, *Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Sosiohumaniora* Vol. 6 (2), 64.

Ishartanto⁸ menyatakan bahwa pengentasan kemiskinan memiliki keterkaitan dengan tujuan lain yang dicanangkan oleh SDGs.⁷ Tujuan selanjutnya seperti dunia tanpa kelaparan, kesehatan, kesejahteraan, pendidikan serta tujuan yang lain akan dapat terselesaikan apabila kemiskinan dapat ditekan atau setidaknya dikurangi.⁸ Target dan tujuan SDGs dimaksudkan untuk mencapai hasil pembangunan yang menggambarkan adanya kemajuan dalam hal pemberantasan kemiskinan dan kelaparan, mengurangi ketimpangan dalam dan antar negara, memperbaiki manajemen air dan strategi, dan mengambil langkah penting untuk mengatasi perubahan iklim. Hal ini tergambar dalam empat pilar SDGs, yaitu pilar ekonomi, pilar sosial, pilar hukum, serta pilar lingkungan.⁹

Berbicara mengenai pemberantasan kemiskinan dan kelaparan, hal ini erat kaitannya dengan keluarga tunagrahita yang ada di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan data penduduk desa Karangpatihan tahun 2022 dari total penduduk 5.845 jiwa terdapat 96 warganya sebagai penyandang disabilitas intelektual atau tunagrahita.¹⁰ Tunagrahita merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut anak yang mempunyai kemampuan intelektual di bawah rata-rata.¹¹ Mereka kurang cakap dalam memikirkan hal-hal yang abstrak, yang sulit-sulit, dan yang berbelit-belit.¹² Warga tunagrahita di dusun Karangpatihan ini mempunyai berbagai tantangan dan

⁷ Ishartano & Raharjo, T.S. (2016). Sustainable Development Goals dan Pengentasan Kemiskinan. *Social Work Jurnal*, 6(2)

⁸ Nanda Bhayu Pratama, Eko Priyo Purnomo, Agustiyara, Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta, 65.

⁹ Ayu Oktaviani Musri, Pelaksanaan Program Sustainable Development Goals (Sdgs) Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Mengurangi Kemiskinan, Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial, Univ. Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020, 2.

¹⁰ Wawancara, Eko Mulyadi (Karangpatihan Ponorogo, 04 April 2023).

¹¹ Somantri, S. (2006). *Psikologi Anak Luar Biasa*. PT. Refika Aditama. Bandung.

¹² Moh. Amin. (1995). *Orthopedagogik Tunagrahita*. Jakarta: Depdikbud.

hambatan untuk menjadi insan yang mandiri sebab keterbatasan fisik, kemampuan kognitif dan rasa minder yang dimilikinya, sehingga warga Tunagrahita ini terus dipandang sebagai beban keluarga dan lingkungan dusun tersebut.¹³ Kondisi tersebut menjadikan warga di Desa Karangpatihan kesusahan dalam mendapatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.¹⁴ Dengan kondisi tersebut diperlukan adanya sebuah cara untuk memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat tunagrahita. Sebagaimana jurnal yang ditulis oleh Arni¹⁵, bahwa pemberdayaan penyandang disabilitas tidak bisa hanya menggantungkan pada peran pemerintah, namun perlu upaya lain untuk mewujudkannya. Pemberdayaan dianggap sebagai upaya strategis dalam menangani kemiskinan yang ada di Indonesia.¹⁶

Pemberdayaan ekonomi ialah serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan atau mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan dan atau keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.¹⁷ Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan

¹³ Hanafi Hadi Susanto, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kampung Idiot Karangpatihan Balong Ponorogo*, JoIE: Jpurnal of Islamic Economics, Vol 1, Nomor 1, Januari-Juni 2021, 4.

¹⁴ Amila, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Tunagrahita Melalui Kelompok Swadaya Masyarakat Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit*, Tesis Magister, (Malang: Program Magister Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017). 2.

¹⁵ Arni Surwanti, *Model Pemberdayaan Ekonomi Penyandang Disabilitas di Indonesia*, (Jurnal Manajemen dan Bisnis; Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol. 5, 1, Maret 2014).

¹⁶ Joko Prastowo, *Belajar Dari Masyarakat Best Practices Program Kuliah Kerja Nyata Pelajaran Pemberdayaan Masyarakat Lppm Ugm*, (Bantul: Samudera Biru, 2010), 11.

¹⁷ Hanafi Hadi Susanto, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kampung Idiot Karangpatihan Balong Ponorogo.*, 5.

keterbelakangan.¹⁸ Sasaran utama pemberdayaan masyarakat ialah mereka yang lemah dan tidak memiliki daya, kekuatan atau kemampuan mengakses sumberdaya produktif atau masyarakat yang terpinggirkan dalam pembangunan. Tujuan akhir dari proses pemberdayaan masyarakat ialah untuk memandirikan warga masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidup keluarga dan mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya.¹⁹ Inti dari pemberdayaan adalah meliputi tiga hal, yaitu pengembangan, (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*), terciptanya kemandirian.²⁰

Pemberdayaan yang dilakukan di desa Karangpatihan dalam rangka memberi keahlian warga tunagrahita serta mengurangi jumlah kemiskinan diantaranya adalah dengan pembuatan kerajinan keset, pembuatan kerajinan tangan tasbih, ternak lele, ternak kambing, dan industri batik ciprat yang sudah di distribusikan ke beberapa kota di Indonesia.²¹ Upaya pemberdayaan tersebut dilakukan pemerintah untuk memandirikan warga tunagrahita agar mereka tidak bergantung terhadap orang lain. Pelatihan program pemberdayaan dilakukan di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Rumah Harapan Mulya, diikuti oleh warga tunagrahita dengan pendampingan. Pada awalnya pelaksanaan program pemberdayaan seperti ini cukup efektif diterapkan terhadap warga tunagrahita. Namun saat ini ada yang mulai enggan untuk melaksanakan program pemberdayaan, tidak memperdulikan himbauan dari pemerintah desa. Mereka

¹⁸ Aprillia Theresia Dkk, *Pembangunan Berbasis Masyarakat, Acuan Bagi Praktisi, Akademisi, Dan Pemerhati Pembangunan Masyarakat* (Bandung: Alfabeta, 2015), 110.

¹⁹ Kesi Widjajanti, *Model Pemberdayaan Masyarakat*, Jurnal ekonomi Pembangunan, Semarang, 2011, 16.

²⁰ Winarni, Tri. *Memahami Pemberdayaan Masyarakat Desa Partisipatif dalam Orientasi Pembangunan Masyarakat Desa Menyongsong Abad 21: Menuju Pemberdayaan Pelayanan Masyarakat*, Yogyakarta: Aditya Media. 1998.

²¹ Eko Mulyadi, Seminar Desember 2019.

hanya mau datang ke balai pelatihan apabila ada pemberitahuan bantuan datang. Hal ini jelas menjadi tidak efektif untuk jangka panjang apalagi agar bisa mencapai tujuan pemberdayaan, yaitu memandirikan masyarakat.²²

Adapun fokus utama dalam penelitian ini adalah efektivitas pemberdayaan ekonomi keluarga tunagrahita dalam konsep *Sustainable Development Goals*. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa jumlah tunagrahita yang ada di desa Karangpatihan cukup banyak, sehingga membutuhkan penanganan serius agar program-program yang dilaksanakan memiliki efektivitas yang tinggi terhadap tujuan yang ingin dicapai. Untuk mengetahui tingkat efektivitas tersebut, dapat dilakukan dengan melakukan penelitian secara mendalam sehingga didapatkan data akurat mengenai program pemberdayaan yang dijalankan.

Efektivitas merupakan salah satu hal terpenting dalam sebuah program, sebab ukuran keberhasilan dari sebuah program dapat dinilai dari tingkat efektivitasnya. Dalam mengukur tingkat efektivitas dapat dilihat dari seberapa jauh pencapaian hasil dari tujuan yang direncanakan, seperti yang dikemukakan oleh Richard M. Steers bahwa ukuran efektivitas dapat dilihat melalui pencapaian tujuan, integritas serta adaptasi. Dalam hal ini pengukuran efektivitas program pemberdayaan ekonomi keluarga tunagrahita diukur melalui tiga hal tersebut sehingga apa yang dihasilkan apakah dapat menunjang dalam pemberdayaan ekonomi keluarga tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

²² Diah Restu Nur Hasanah, Analisis model Peberdayaan Masyarakat Pada Warga Tunagrahita Di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, Skripsi FEBI IAIN Ponorogo, 2020, 6-7.

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas permasalahan yang menyangkut program pemberdayaan ekonomi keluarga tunagrahita menjadi sebuah penelitian tesis dengan judul “Efektivitas Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Tunagrahita Dalam Konsep *Sustainable Development Goals* di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberdayaan ekonomi keluarga tunagrahita di desa Karangpatihan?
2. Bagaimana dampak program pemberdayaan ekonomi dalam meningkatkan pendapatan keluarga tunagrahita di desa Karangpatihan ?
3. Bagaimana efektivitas pemberdayaan ekonomi keluarga tunagrahita prespektif *sustainable development goals* ?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk menganalisis pelaksanaan pemberdayaan ekonomi keluarga tunagrahita di desa Karangpatihan.
2. Untuk menganalisis dampak pemberdayaan ekonomi dalam meningkatkan pendapatan keluarga tunagrahita di desa Karangpatihan.
3. Untuk menganalisis efektivitas pemberdayaan ekonomi keluarga tunagrahita prespektif *sustainable development goals*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih keilmuan serta memperluas wawasan, dan menjadi referensi kajian berikutnya yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat sebagai alternatif optimalisasi sumber daya manusia. Selain itu diharapkan hasil dari kajian ini dapat menarik perhatian peneliti lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang masalah serupa.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Peneliti, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan khususnya mengenai pemberdayaan masyarakat sebagai alternatif optimalisasi sumber daya manusia.
- b. Bagi akademisi, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan tambahan literatur keilmuan, khususnya untuk jenis penelitian yang membahas mengenai pemberdayaan masyarakat sebagai alternatif optimalisasi sumber daya manusia.

E. Kajian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran pustaka yang Peneliti lakukan, terdapat beberapa penelitian yang memiliki kemiripan atau menyinggung tentang tema pembahasan Peneliti, diantaranya:

1. Amin Tohari, “Analisis pemberdayaan masyarakat terhadap kesejahteraan petani di Desa Gandu (studi pada komunitas masyarakat peduli lingkungan)”, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi petani yang

dilakukan oleh KMPL menggunakan pendekatan *mix metod top down* dan *bottom up*. Strategi yang digunakan cenderung kepada aras mezzo yang menekankan pada upaya pemanfaatan potensi masyarakat melalui pemberian motivasi. Pemberdayaan ekonomi petani di Desa Gandu dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal yang mendukung dan menghambat jalannya pemberdayaan. Dampak pemberdayaan terhadap ekonomi petani Desa Gandu, yaitu biaya operasional rendah dan meningkatkan hasil panen.

2. Amila, “ pemberdayaan ekonomi masyarakat tunagrahita melalui kelompok swadaya masyarakat rumah harapan karangpatihan bangkit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi warga tunagrahita melalui KSM rumah harapan karangpatihan bangkit adalah dengan memberikan pelatihan, keterampilan dan pembinaan, penguatan modal, pelatihan usaha, penguatan pendampingan, serta penguatan pemasaran. Hasil dari adanya pemberdayaan ekonomi melalui KSM rumah harapan telah memberikan implikasi pada warga tunagrahita yakni, memiliki pendapatan dari kegiatan usaha, memiliki kemampuan mobilitas, memiliki partisipasi dalam kehidupan sosial.
3. Risky Aprilian Syahputra, “Analisa Pemberdayaan petani padi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam prespektif Ekonomi islam (Studi pada petani padi desa karang sari kecamatan jati agung kabupaten Lampung Selatan)”, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pemberdayaan ekonomi petani di desa karang sari yang dilakukan melalui beberapa upaya pengembangna meliputi peningkatan akses asset produktif dan peningkatan akses pasar dapat meningkatkan pendapatan petani. Dengan

berkembangnya usaha tani maka dapat meningkatkan kesejahteraan petani serta menambah pendapatan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan perumahan. Sedangkan dalam tinjauan ekonomi Islam kegiatan dalam pelatihan tersebut merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM dan dalam kegiatan ekonomi petani sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yakni adanya sikap jujur, tidak merusak lingkungan dan memberikan upah untuk pekerjanya sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat

4. Ayu Oktaviani Musri, “pelaksanaan program *Sustainable Development Goals (SDGs)* oleh Dinas sosial kota Pekanbaru dalam mengurangi kemiskinan”. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Dinas sosial kota pekanbaru sudah cukup berhasil untuk mengurangi tingkat kemiskinan di kotaa pekanbaru. Dari program yang sudah dijalankan, yang lebih diprioritaskan adalah program PKH, PIP, PIS dan BPNT guna mengentaskan kemiskinan. Dinas sosial kota pekanbaru dikatakan berhasil dalam mengurangi tingkat kemiskinan, namun dalam implementasinya program yang dijalankan tidak sesuai dengan prosedur dan banyak tidak tepat sasaran terhadap masyarakat miskin.
5. Maria Yasinta Serena, “Upayay mengatasi kemiskinan desa melalui program *Sustainable Development Goals (SDGs)* (studi padaa kantor desa karang bayan kecamatan lingsar Kabupaten Lombok Barat)”, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam memaksimalkan pencapaian target SDGs tanpa kemiskinan telah dilakukan berbagai upaya pengentasan kemiskinan. Hal ini

dilakukan dengan memberikan bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan ekonomi.

6. Ahmad Sarifudin, “Analisa Penerapan konsep *Sustainable Development Goals* sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat menurut perspektif ekonomi Islam (studi pada industri pertambangan pasir di Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah)”, Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dengan adanya penambangan pasir di lahan pemilik sawah menjadikan pendapatan tambahan dan meningkatkan kesejahteraan bagi para petani. Akan tetapi menimbulkan dampak negatif seperti meningkatkan polusi udara, kebisingan, tercemarnya aliran sungai dan rusaknya jalan. Di dalam fiqih merusak dan mencemari lingkungan hidup yang merusak keseimbangan ekosistem adalah haram hukumnya sebab perbuatan tersebut dilarang oleh syara’. Demi terlaksananya praktek pertambangan yang efisien perlu adanya kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengawasi kegiatan penambangan sehingga lebih menjain terciptanya kesejahteraan masyarakat serta pertambangan yang lebih menjaga lingkungan.

Dari penelusuran tersebut, Peneliti menyimpulkan bahwa penelitian tentang “Efektivitas Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Tunagrahita Dalam Konsep *Sustainable Development Goals* di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo” belum ada yang membahasnya, sehingga Peneliti tertarik untuk menelitinya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan merupakan penelitian kualitatif, yaitu peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya setempat. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²³ Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk menggambarkan (*to describe*), memahami (*to understand*), dan menjelaskan (*to explain*) tentang suatu fenomena yang unik secara mendalam dan lengkap dengan prosedur dan teknik yang khusus sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif sehingga menghasilkan teori yang *grounded*, yakni teori yang dibangun berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian berlangsung.²⁴

2. Kehadiran peneliti

Peneliti akan melakukan penelitian dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak pemberdaya ekonomi masyarakat tunagrahita yakni kepala desa dan pihak-pihak yang terkait dalam pemberdayaan untuk menggali informasi mengenai efektivitas pemberdayaan ekonomi keluarga tunagrahita dalam konsep *Sustainable Development Goals* (SDGs).

²³ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2008), 21.

²⁴ Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 143.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. dengan alasan, antara lain: *Pertama*, Desa Karangpatihan banyak masyarakat miskin yang termarginalkan sebab kondisi keterbelakangan mental pada dirinya. *Kedua*, masyarakat penyandang tunagrahita kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sebab kondisi ketidakberdayaannya serta keterbatasan kemampuan yang dimiliki. *Ketiga*, bantuan yang diberikan dari pemerintah maupun masyarakat tidaklah membantu secara berkelanjutan,. *Keempat*, terdapat pemberdayaan untuk memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat tunagrahita di Desa Karangpatihan.

4. Data dan Sumber Data

Menurut Burhan Bugin, sumber data dalam penelitian kualitatif adalah sumber daya primer dan sekunder.²⁵

a. Sumber data primer

Data-data utama diperoleh secara langsung dari informan. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah pihak pemberdaya keluarga tunagrahita yakni kepala Desa Karangpatihan serta para pihak yang terkait dalam pemberdayaan.

b. Sumber data sekunder

Dalam penelitian ini sumber data sekunder adalah referensi pustaka, yaitu: referensi yang memuat berbagai informasi tertulis dari data-data yang diperoleh di LKS Rumah harapan mulya. Selain itu penulis juga menggunakan berbagai

²⁵ Burhan Bugin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis Dan Metodologis Ke arah Penguasaan Model Aplikasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 161-162.

sumber pustaka berupa buku-buku, atau informasi-informasi lain yang dimiliki keterkaitan dengan judul yang diangkat penulis sebagai pendukung kelengkapan data. Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

5. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data dilapangan dalam rangka mendiskripsikan dan menjawab permasalahan yang sedang diteliti digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh informasi-informasi dari informan dengan tatap muka.²⁶ Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah semi terstruktur, artinya wawancara dengan perencanaan yang sebelumnya sudah tersusun dengan rapi secara sistematis.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data di mana Peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala objek yang diteliti. Pengamatan ini dilakukan baik dalam situasi yang sebenarnya maupun situasi buatan yang khusus diadakan.²⁷

c. Dokumentasi

²⁶ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), 83.

²⁷ Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), 136.

Dokumentasi adalah mencari data mengenai suatu hal yang berasal dari pihak lain yang berupa catatan, buku, dan surat kabar.²⁸ Dalam hal ini Peneliti mengumpulkan dokumentasi untuk melengkapi data-data dan dokumentasi tersebut Peneliti pilih yang berkaitan langsung dengan pemberdayaan ekonomi keluarga tunagrahita.

6. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reabilitas) serta derajat kepercayaan dan keabsahan data (kredibilitas data).²⁹ Kredibilitas dimaksudkan untuk membuktikan bahwa apa yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan kenyataan yang ada dalam latar belakang penelitian. Untuk menetapkan kredibilitas data tersebut digunakan teknik pemeriksaan ketekunan pengamatan atau kedalaman observasi dan triangulasi.

7. Teknik pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapihkan data hasil pengumpulan data lapangan sehingga siap dipakai untuk dianalisis. Pengolahan data sebagai kegiatan mengolah dan merapikan data yang terkumpul.³⁰ dalam penelitian ini data-data yang diperoleh dilapangan akan diolah berdasarkan langkah-langkah berikut:

- a. Editing, pada tahap ini Peneliti menelaah kembali data-data yang diperoleh dengan tujuan apakah data yang didapat bisa membantu dalam memecahkan permasalahan yang ditulis Peneliti.

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 135.

²⁹ Ibid., 178.

³⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 72.

- b. *Classifying*, tahap ini adalah mengklasifikasikan data yang diperoleh kedalam pola tertentu agar lebih mudah dalam memahami dan membahas permasalahan sesuai apa yang dibutuhkan Peneliti.
- c. *Verifying*, adalah sebuah langkah yang diperluakn peneliti dalam membuktikan kebenaran data untuk menjaga kevaliditas data yang diperoleh.
- d. *Analysing*, adalah tahap penganalisan data agar data mentah yang diperoleh bisa lebih mudah dipahami. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.
- e. *Concluding*, merupakan tahap akhir dalam pengolahan data, yaitu tahap pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh.

Peneliti melakukan analisis terhadap data-data penelitian dengan tujuan agar menambah khasanah ilmu pengetahuan dan Peneliti dapat memahami serta dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat dalam sebuah ilmu pengetahuan khususnya mengenai pembahasan ini.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penulisan serta penyusunan laporan hasil penelitian kualitatif ini, maka pembahasan laporan penelitian ini dikelompokkan menjadi 5 bab yang masing-masing bab terdiri sub-sub yang berkaitan. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai penjelasan secara umum dan gambaran tentang isi tesis, diantaranya berisi tentang latar

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : EFEKTIFITAS PEMBERDAYAAN EKONOMI DALAM KONSEP *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*

Bab ini menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan teori yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti meliputi pengertian efektivitas, pendekatan dalam pengukuran efektivitas, pengertian pemberdayaan ekonomi, tujuan pemberdayaan, strategi pemberdayaan, model pemberdayaan, pengertian *Sustainable Development Goals* (SDGs), tujuan konsep *Sustainable Development Goals*, indikator dan implementasi *Sustainable Development Goals*.

BAB III : PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN DALAM KONSEP *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SDGs) DI DESA KARANGPATIHAN KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO

Bab ini berisi tentang data umum yang meliputi: gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi demografi dan kondisi sumber daya alam, Data khusus meliputi: pelaksanaan pemberdayaan ekonomi keluarga tunagrahita di desa

Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, faktor pendorong dan penghambat pemberdayaan, dampak pemberdayaan terhadap ekonomi keluarga tunagrahita, konsep pemberdayaan ekonomi keluarga tunagrahita dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals*.

BAB IV : ANALISIS EFEKTIFITAS PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA TUNAGRAHITA DALAM KONSEP *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS)* DI DESA KARANGPATIHAN KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO

Bab ini berisi tentang: analisis pelaksanaan pemberdayaan ekonomi keluarga tunagrahita di desa Karangpatihan kecamatan Balong kabupaten Ponorogo, analisis dampak pemberdayaan terhadap ekonomi keluarga tunagrahita di Desa Karangpatihan, analisis efektivitas program pemberdayaan ekonomi keluarga tunagrahita dalam konsep *Sustainable Development Goals*.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab berisi kesimpulan dan dilengkapi dengan saran sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian Peneliti

BAB II

EFEKTIVITAS PEMBERDAYAAN EKONOMI DALAM KONSEP *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*

A. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mempunyai beberapa arti antara lain: (1) ada efeknya (akibat, pengaruh, dan kesan), (2) manjur atau mujarab, (3) mendatangkan hasil, berdaya guna (tentang usaha, tindakan) dan mulai berlaku. Dari kata itu muncul pula keefektifan yang digambarkan sebagai kondisi pengaruh dampak keberhasilan dan kemanjuran.¹ Definisi efektivitas secara umum menunjukkan seberapa jauh suatu tujuan telah dilaksanakan. Efektivitas merupakan unsur dasar untuk mencapai keinginan atau tujuan yang telah ditentukan oleh setiap organisasi. Hal demikian sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Caster I. Bernard bahwa efektivitas adalah tercapainya tujuan yang disepakati bersama.² Secara terminologi, beberapa ahli mendefinisikan kata efektivitas sebagai berikut:

- a. Menurut ahli manajemen, Peter Drucker, efektivitas erat kaitannya dengan efisiensi, efisiensi mengerjakan sesuatu dengan benar (doing the

¹ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 219.

² Yogi Eka Prasetya, "*Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Pnpm) Mandiri Perkotaan Dalam Menunjang Pembangunan Desa, Studi Di Desa Buduran Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo*", (Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2014), 42.

right), sedangkan efektivitas adalah mengerjakan sesuatu yang benar (doing the right things).³

- b. Menurut Hidayat, efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah tercapai, dimana semakin besar persentase target yang dicapai. Maka semakin tinggi tingkat efektivitasnya.⁴
- c. Menurut Supriyono, efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggungjawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi dari pada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan pula aunit tersebut.⁵
- d. Habey berpendapat bahwa efektif adalah tepat mengenai sasaran, artinya segala sesuatu yang dilaksanakan sesuai rencana yang telah ditentukan.⁶
- e. Sedarmayanti berpendapat bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran mengenai pencapaian unjuk kerja yang maksimal dan seberapa jauh target dapat tercapai.⁷
- f. Sondang P. Siagian berpendapat bahwa efektivitas kerja adalah penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Artinya

³ T. Hana Handoko, *Manajemen*, Ed Ii (Yogyakarta: Bpef, 1993), 7

⁴ Rany An Nisaa Syabrina, "Efektivitas dan Efisiensi Komunikasi Pada Penyelenggaraan Damar Kurung Gresik Tahun 2017", *Unair Repository* (Juni, 2018), 3.

⁵ Supriyono, "*Sistem Pengendalian Manajemen*", (Semarang: Universitas Diponegoro, 2000), 29.

⁶ Mangkunegara, "*Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*", (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 16.

⁷ Sedarmayanti, "*Manajemen Sumber Dya Manusia, Reformasi, Birokrasi Dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*", (Bandung: Aditama, 2009), 29.

pelaksanaan tugas dinilai baik dan tidaknya sangat bergantung pada bilamana tugas itu terselesaikan.⁸

- g. Agung Kurniawan mendefinisikan efektivitas sebagai kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak ada tekanan atau ketegangan dalam pelaksanaannya.⁹
- h. Menurut Richard Steers, efektivitas dijabarkan berdasarkan kapasitas suatu organisasi untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber daya yang langka dan berharga dengan cara sependai mungkin dalam usahannya mengejar tujuan operasi dan operasionalnya.¹⁰
- i. Robert Chambers mengemukakan, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu Lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugas pokoknya atau mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.¹¹

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan ukuran keberhasilan sebuah organisasi atau program, sebab efektivitas sangat bergantung pada proses yang dilakukan. Karena proses merupakan jalan yang harus dilalui, maka proses mempunyai peranan yang sangat penting dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

⁸ Sondang P. Siagian, "*Kiat Meningkatkan Aktifitas Kerja*", (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 151.

⁹ Agung Kurniawan, "*Transformasi Pelayanan Public* ", (Jogjakarta: Pembaruan, 2005), 109.

¹⁰ M. Richard Steers, Terj: Magdalena Jamin, *Efektivitas Organisasi*, (Jakarta: Erlanga, 1980), 5.

¹¹ Robert Chambers, "*Pembnagunan Desa Mulai Dari Belakang*", (Jakarta: LP3S, 1998), 47.

2. Pendekatan Dalam Pengukuran Efektivitas.

Mengukur tingkat efektivitas suatu organisasi atau program bukanlah suatu hal yang mudah, sebab efektivitas dapat dilihat dari berbagai faktor, hal ini tergantung pada siapa yang menilai serta mentafsirkannya. Sebagai contoh, dalam sebuah perusahaan, efektivitas dapat diartikan sebagai besarnya pendapatan yang diperoleh, sedangkan menurut pengamat sosial, efektivitas berarti tingkat kesejahteraan pekerjaan, atau diartikan oleh lembaga akademias, maka efektivitas merupakan kualitas lulusan peserta didiknya. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan bantuan membandingkan rencana yang dibuat dengan hasil yang dicapai. Apabila usaha atau tindakan yang dilakukan tidak tepat hingga menyebabkan tujuan tidak tercapai, maka dapat dikatakan percuma atau tidak efektif.

Adapun kriteria untuk mengukur efektivitas, ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan, antara lain:

- a. Menurut Martani dan Lubis, ada tiga pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas organisasi, yakni:¹²
 - 1) Pendekatan sumber (*resource approach*) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

¹² Hari Lubis, *Teori Organisasi, suatu pendekatan Makro*, 55

- 2) Pendekatan proses (*process approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
 - 3) Pendekatan sasaran (*goals approach*) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana.
- b. Menurut Richard M. Steers, ukuran efektivitas adalah sebagai berikut:
- 1) Pencapaian tujuan, merupakan keseluruhan dari upaya maupun tujuan yang sesuai rencana yang diharapkan. Tujuan pencapaian tersebut harus mampu memberikan manfaat individu maupun organisasi.
 - 2) Integrasi, yaitu merupakan pengukuran yang mampu memberikan dampak berkesinambungan dengan program yang lainnya sehingga mampu membentuk komunikasi berbagai organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi dan partisipasi masyarakat.
 - 3) Adaptasi, adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.
- c. Sondang P. Siagian mengemukakan bahwa efektivitas dapat dilihat dalam:¹³

¹³ Sondang P. Siagian, "Manajemen Sumber Daya Manusia", (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 77.

- 1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai. Hal ini dimaksudkan agar karyawan dalam melaksanakan tugas-tugasnya mencapai sasaran yang terarah sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.
- 2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan. Strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai Upaya untuk mencapai sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- 3) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap. Hal ini berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan, artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- 4) Perencanaan yang matang, yaitu memutuskan apa yang harus dikerjakan oleh organisasi di masa depan.
- 5) Penyusunan program yang tepat. Suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat, karena jika tidak, maka para pelaksana program akan kurang memiliki pedoman dalam bertindak dan bekerja.
- 6) Tersedianya sarana dan pra sarana kerja. Salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Hal ini bergantung pada sarana dan pra sarana yang tersedia dan yang mungkin disediakan oleh organisasi.¹⁴

¹⁴ Sondang P. Siagian, “*Manajemen Sumber Daya Manusia*”, ... 77.

- 7) Pelaksanaan yang efektif dan efisien. Sebaik apapun program, jika tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sarannya, karena itu pelaksanaan organisasi harus semakin didekatkan pada tujuannya.
 - 8) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. Mengingat sifat manusia yang tidak sempurna, maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.
- d. Menurut Chambers, pengukuran efektivita secara umum dan menonjol adalah:¹⁵
- 1) Keberhasilan program
 - 2) Keberhasilan sasaran
 - 3) Kepuasan terhadap program
 - 4) Tingkat input dan output
 - 5) Pencapaian tujuan menyeluruh

B. Konsep Dasar Pemberdayaan ekonomi

1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi

Dalam konteks pemberdayaan, inti dari pemberdayaan ialah pemanusiaan. Pada hakikatnya konsep pemberdayaan adalah terjemahan dari bahasa Inggris yakni “*empowerment*” dan “*empower*” yang memiliki dua pengertian; *pertama* adalah “*to give power authority to*” yang artinya memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. *Kedua* adalah “*to give*

¹⁵ Robert Chambers, “*Pembangunan Desa Mulai Dari Belakang*”, 121.

ability to or enable” yang artinya upaya untuk memberi kemampuan atau pemberdayaan.¹⁶ Pemberdayaan adalah upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat. Dalam konsep pemberdayaan ini berarti masyarakat turut serta aktif berpartisipasi dan terlibat dalam kegiatan tersebut.¹⁷ Pengertian pemberdayaan telah banyak diungkapkan oleh para ilmuwan guna memberikan pemahaman dasar mengenai pemberdayaan. Berikut terdapat beberapa pengertian pemberdayaan menurut para tokoh.

Menurut Edi Suharto¹⁸ pemberdayaan adalah sebuah proses yang membuat orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya orang lain yang menjadi perhatiannya. Kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat bergantung pada dua hal; *pertama* bahwa kekuasaan dapat berubah. Apabila kekuasaan tidak dapat berubah, maka pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun. *Kedua* bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang bersifat dinamis.¹⁹

¹⁶ Agustinus Ionga Tiza, Implementasi Program Pembangunan Desa Mandiri Anggaran Untuk Rakyat Menuju Sejahtera (Anggar Merah) Di Kabupaten Timor Tengah Utara, Tesis Magister, (Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Univ Brawijaya Malang, 2014).

¹⁷ Amila, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Tunagrahita Melalui Kelompok Swadaya Masyarakat Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit, Tesis Magister, (Malang: Program Magister Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017).

¹⁸ Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri: Memperkuat Tanggungjawab Sosial Perusahaan*, cetakan 1, (Bandung: PT Reifka Aditama, 2007), 58-59.

¹⁹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2014), 58.

Menurut Ach. Wazir pemberdayaan dapat diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian tersebut seseorang dapat berpartisipasi apabila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan, serta tanggungjawab bersama.²⁰

Menurut Jim Ife pemberdayaan artinya memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan, kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam memengaruhi kehidupan dari masyarakatnya.²¹ Pemberdayaan diharapkan masyarakat yang kurang berdaya menjadi masyarakat yang berdaya dan kuat dengan menggali serta mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Dengan kata lain pemberdayaan adalah untuk mencapai tujuan akhir yang disebut dengan masyarakat sejahtera dan mandiri sehingga mempunyai kekuatan hidup atas potensi dirinya.²²

Pengertian pemberdayaan menurut Goutler adalah bahwa paradigma pemberdayaan ialah paradigma pembangunan manusia, yakni pembangunan yang berpusat pada rakyat merupakan proses pembangunan yang mendorong prakarsa masyarakat dari bawah. Dalam hal ini persoalan bagian yang tertinggal dalam

²⁰Ach Wazir WS, *Panduan Penguatan Manajemen Lembaga Swadaya Masyarakat*, (Jakarta: Sekertariat Bina Desa: 1999), 29.

²¹Zubaedi, *Wacana Pembangunan Alternatif* (Yogyakarta: ArRuzz Media Group, 2007), Cet.ke-1, 98.

²²Owin Jamasy, *Keadilan, Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan*, (Jakarta: Belantik, 2004), Cet. ket-1, 108

masyarakat harus ditingkatkan kemampuannya dengan cara mengembangkan dan mendinamisasikan potensinya serta memberdayakannya.²³

Dari beberapa pengertian mengenai pemberdayaan diatas, sebenarnya semua definisi mempunyai makna yang hampir sama, maka disini akan diambil benang merah bahwa pemberdayaan itu mengarah kepada perbaikan dari yang semula lemah menjadi kuat. Baik dalam hal pemikiran, tindakan ataupun langkah perbaikan. Sehingga pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam suatu masyarakat sehingga menjadi kuat dan terlepas dari permasalahan yang ada.

Pemberdayaan ekonomi adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan atau mengoptimalkan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai proses, pemberdayaan merujuk pada kemampuan, untuk berpartisipasi memperoleh kesempatan dan atau mengakses sumberdaya dan layanan yang diperlukan untuk memperbaiki mutu hidupnya (baik secara individual, kelompok, dan masyarakatnya dalam arti luas). Dengan pemahaman seperti itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses terencana untuk meningkatkan skala/*upgrade* utilitas dari obyek yang diberdayakan. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat terutama mereka yang miskin sumber daya, kaum perempuan dan kelompok yang terabaikan lainnya, di dukung agar mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri.²⁴

²³ Alfitri, *Community Development Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 21.

²⁴ Totok Mardikanto dan Purwoko Soebianto. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung : Alfabeta, 2012). 27.

Pemberdayaan ekonomi dapat menghasilkan suatu kesejahteraan yang merupakan impian setiap orang dan setiap negara. Kondisi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang sejahtera menjadi sesuatu yang diidealkan.²⁵ Menurut Sumodiningrat, pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mendirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Hal ini berarti bahwa masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa masyarakat yang berdaya adalah masyarakat yang dapat memilih dan mempunyai kesempatan untuk mengadakan pilihan-pilihan.²⁶

2. Tujuan Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok-kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (persepsi dari masyarakat itu sendiri) maupun kondisi eksternal (ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil). Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan ialah untuk membentuk individu masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak serta mengendalikan apa yang mereka lakukan.²⁷ Terdapat beberapa kelompok yang dapat dikategorikan kelompok masyarakat yang lemah atau kurang berdaya diantaranya sebagai berikut:²⁸

²⁵ Soetomo, *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya dalam Perspektif Masyarakat Lokal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 1.

²⁶ Zubaedi, *Wacana Pembangunan Alternatif*, 41-42.

²⁷ Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2017), 80.

²⁸ Edi Suharto, *Pekerja Sosial Di Dunia Industri: Memperkuat Tanggungjawab Sosial Perusahaan*, 110.

- a. Kelompok lemah secara fisik, yaitu orang dengan kecacatan dan kemampuan khusus.
- b. Kelompok lemah secara psikologis, yaitu orang yang mengalami masalah personal dan penyesuaian diri.
- c. Kelompok lemah secara finansial, yaitu orang yang tidak memiliki pekerjaan, pendapatan, modal, dan asset yang mampu menopang hidupnya.
- d. Kelompok lemah secara struktural, yaitu orang yang mengalami diskriminasi dikarenakan status sosialnya, gender, etnis, orientasi seksual, maupun pilihan politik.

Adapun beragam tujuan pemberdayaan meliputi upaya perbaikan pendidikan dan memberikan dampak positif untuk perbaikan lainnya, yaitu seperti perbaikan kelembagaan, usaha, pendapatan, lingkungan, kehidupan dan masyarakat.²⁹ Dengan demikian, akan memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga maupun masyarakat dan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik lagi. Ada 3 tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu mengembangkan kemampuan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat, dan perlindungan terhadap masyarakat.

3. Konsep Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang dalam kondisi lemah dan tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dalam konsep

²⁹ Aprillia Theresia, Krishna S. Andini, dkk, *Pembangunan Berbasis Masyarakat* (Bandung: Alfabeta, 2014), 153.

untuk mencapai tujuan pemberdayaan, terdapat beberapa langkah kebijakan yang dilakukan sebagaimana yang dijelaskan oleh Gunawan Sumodiningrat berikut ini:³⁰

- a. Memberikan peluang atau akses yang lebih besar pada akses produksi.

Dasar dari sebuah asset produksi adalah akses kepada dana, sehingga dengan dana yang memadai dapat pembentukan modal bagi usaha rakyat yang selanjutnya mampu meningkatkan produksi, pendapatan dan menciptakan tabungan yang dapat meningkatkan pemupukan modal secara berkelanjutan.

- b. Memperkuat posisi transaksi dan kemitraan rakyat

Upaya yang digunakan dalam memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi adalah dengan pendekatan kebersamaan. Membangun rasa kesetiakawanan sehingga menciptakan rasa percaya diri serta meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab bahwa kemenangan dalam persaingan perdagangan bebas tidak akan tercapai tanpa adanya rasa kebersamaan. Untuk mendorong produktivitas dan tumbuhnya usaha, komponen penting dalam usaha pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi adalah pembangunan prasarana produksi dan pemasaran.

- c. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pelayanan kesehatan makin ditingkatkan secara lebih merata, disertai upaya peningkatan gizi.

- d. Kebijakan pengembangan industri harus mengarah pada penguatan industri rakyat yang terkait dengan industri besar.

³⁰ Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik Dan Implementasi*. Disampaikan Pada Seminar Pemberdayaan Masyarakat Yang Diselenggarakan Bappenas, Pada Tanggal 6 Maret 2000 Di Jakarta. Naskah No. 20. Jnu-Juli 2000

Praktik pemberdayaan ekonomi saat ini dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan, sebagaimana yang diungkapkan dalam teori Mardi Yatmo sebagai berikut:³¹

a. Penguatan Modal

Modal merupakan faktor penting dalam dunia usaha, tetapi bukan yang terpenting. Sebab yang terpenting adalah bagaimana aspek permodalan dalam usaha pemberdayaan ekonomi dapat memberikan bantuan modal yang tidak mengakibatkan ketergantungan masyarakat. Salah satu permasalahan yang dihadapi masyarakat tunadaya adalah permodalan. Faktor modal menjadi salah satu penyebab tidak munculnya usaha-usaha baru di luar sektor ekstraktif. Oleh sebab itu dalam pemberdayaan ekonomi, penting dan harus dilakukan pemecahan dal aspek modal.

Cara yang efektif dalam memfasilitasi pemecahan masalah permodalan tersebut adalah dengan menjamin kredit mereka dilembaga keuangan yang ada, atau memberi subsidi bunga atas pinjaman mereka di lembaga keuangan. Dengan cara ini dapat mendidik mereka untuk bertanggung jawab terhadap pengembalian kredit serta menjadi sarana bagi mereka untuk terbiasa bekerjasama dengan lembaga keuangan yang ada, serta membuktikan kepada lembaga keuangan bahwa tidak ada alasan untuk diskriminatif dlam pemberian pinjaman.

b. Pembangunan Prasarana Pemasaran

Upaya pembangunan prasarana penting untuk dikuatkan karena dengan adanya pemasaran dan transportasi akan mampu meningkatkan penerimaan baik

³¹ Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik Dan Implementasi*.

petani maupun pengusaha mikro. Dalam hal ini pembangunan sarana pemasaran dapat dilakukan sebagai pendukung kegiatan usaha.

c. Pendampingan

Pendampingan sosial merupakan suatu hal yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat sangat memperhatikan pentingnya partisipasi publik yang kuat. Dalam konteks ini, peranan seorang pekerja sering diwujudkan dalam kapasitasnya sebagai pendamping.³² Pendampingan masyarakat tunadaya memang perlu dan penting, dengan tugas utama pendamping adalah memfasilitasi proses belajar atau refleksi menjadi mediator untuk penguatan kemitraan baik antara usaha mikro, usaha kecil, maupun usaha menengah dengan usaha besar.

d. Penguatan Kelembagaan

Pendekatan kelompok untuk tujuan membangun kelembagaan keuangan tersendiri itu tidak mudah untuk mencapainya. Yang paling realistis adalah pengelompokan ekonomi diarahkan pada kemudahan untuk memperoleh akses modal ke lembaga keuangan yang telah ada dan untuk membangun usaha yang ekonomis. Aspek lain adalah dalam hal kemitraan antara skala usaha dan jenis usaha, pasar barang, dan pasar output produksi. Ketiga aspek lembaga ini menurut Mardi penting untuk ditangani dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat.

e. Penguatan kemitraan usaha

Musya Asy'arie berpendapat bahwa berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi, maka perlu adanya dorongan dan memberikan kesempatan kepada

³² Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, 93

masyarakat untuk dapat berlatih dan mempersiapkan dirinya untuk memiliki peluang menjadi wirausaha, dengan memberikan pelatihan sebagai bekal untuk mampu bersaing di dunia wirausaha.³³ Adapun beberapa program pembinaan berkelanjutan yang dapat dilakukan melalui beberapa tahapan sebagaimana berikut:

1) Pelatihan Usaha

Melalui pelatihan, peserta diberikan pemahaman terhadap konsep kewirausahaan, dengan segala permasalahan yang ada di dalamnya. Tujuannya adalah memberikan wawasan yang menyeluruh dan aktual sehingga dapat menumbuhkan motivasi disamping memiliki pemahaman teoritis. Dengan pelatihan diharapkan peserta dapat mencermati kiat-kiat tertentu sehingga dapat menghindari kemungkinan adanya kegagalan dalam wirausaha.

2) Pendampingan

Pada tahap ini, ketika usaha dijalankan maka calon wirausaha di damping oleh tenaga pendamping profesional yang berfungsi sebagai pengarah dan pembimbing, sehingga kegiatan usaha yang dijalannya berhasil dikuasi.

3) Pemagangan

Pemagangan dinilai sangat perlu, karena realitas usaha memiliki karakteristik yang berbeda dengan dunia pendidikan atau kegiatan usaha di luar usaha. Tanpa adanya pengenalan terhadap realitas usaha secara intens dan empiric maka akan memberikan kesulitan bagi seseorang yang akan memulai usahanya.

³³ Musa Asy'arie, *Etos Kerja Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: Lesfi, 1997), 141.

4) Permodalan

Permodalan merupakan aspek penting dalam dunia usaha, sehingga untuk mendapatkan dukungan keuangan yang cukup stabil maka perlu adanya hubungan kerjasama yang baik dengan lembaga keuangan, baik perbankan maupun kemitraan usaha lain. Penambahan modal sebaiknya diberikan bukan untuk modal awal akan tetapi untuk pengembangan setelah usaha itu sudah dirintis dan menunjukkan prospek yang cukup baik.

Dari konsep pemberdayaan yang telah disebutkan diatas, Mardi Yatmo memberikan kritik dan juga saran terhadap konsep pemberdayaan yang selama ini berlangsung. Menurut beliau perlu adanya konsep yang bisa memberantas ketidakberdayaan warga tunadaya mulai dari akar. Adapun konsep yang beliau tambahkan adalah sebagai berikut:³⁴

- a) Adanya efektivitas dan efisiensi program pemberdayaan
- b) Penguasaan faktor produksi
- c) Penguatan SDM
- d) Spesifikasi lokasi dan permasalahan

4. Model Pemberdayaan Ekonomi

Model pemberdayaan adalah pola atau ragam yang digunakan untuk proses menuju berdaya yang diberikan dari pihak yang memiliki daya ke pihak yang kurang berdaya. Model pemberdayaan yang ditujukan bagi masyarakat adalah melalui program pemberdayaan yang dirumuskan dan dilaksanakan dengan

³⁴ Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik Dan Implementasi, ...*

menggunakan pendekatan *bottom up*, yaitu pada pelaksanaan kegiatan di lapangan dilakukan atas dasar inisiatif aspirasi dari masyarakat. Mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan pelaksanaan pembangunan.³⁵ Secara umum, pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan dua model pemberdayaan, yaitu:

a. Model Pemberdayaan Dari Atas Ke Bawah (*Top Down*)

Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi pembangunan, dalam perspektif pembangunan ini disadari betapa penting kapasitas manusia dalam upaya meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal atas sumber daya materi dan nonmaterial sebagai suatu strategi pembangunan.³⁶ Selama ini pemberdayaan didekati dengan berbagai model pendekatan, salah satunya dengan model pendekatan dari atas ke bawah (*top down*). Model *top down* cenderung menggunakan logika berpikir dari ‘atas’ kemudian melakukan pemetaan ‘ke bawah’ untuk melihat keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan. Selain itu, pendekatan ini sering disebut sebagai pendekatan *policy centered*, artinya dalam model pemberdayaan melalui pendekatan *top down* sasaran pemberdayaan hanya menjadi obyek dari yang akan menerima dan menikmati hasil. Pemberdayaan dilakukan oleh pihak luar dari sekumpulan obyek pemberdayaan.³⁷

³⁵ Totok Mardikanto Dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 123-125.

³⁶ Malcolm Payne, *Teori Pekerjaan Sosial Modern*, terj. Susiladiharti (Yogyakarta: Samudra Biru, 2016), 204.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2012), 34.

Model *top down* mempunyai kelebihan, yaitu proses pembangunan dapat berjalan cepat dan target-target yang telah ditetapkan dapat dicapai tepat pada waktunya. Namun model pendekatan demikian sangat ditentukan oleh kemampuan penyediaan dana negara atau pemberdaya dan sangat ditentukan oleh kemauan dan kesungguhan pemberdaya keberlangsungannya. Nyatanya posisi sentral yang mendominasi proses pembangunan ternyata dapat melemahkan masyarakat dan menimbulkan hubungan yang timpang (tidak serasi). Disatu pihak lahir budaya “perintah” dikalangan pelaksana pemberdayaan, dilain pihak akan lahir sikap “diam dan menunggu”. Kini dengan semakin kompleksnya bidang dan permasalahan pembangunan yang harus diselesaikan, semakin disadari bahwa model pemberdayaan *top down* kurang menguntungkan bagi kelangsungan proses pembangunan. Berbagai masalah dan kebutuhan masyarakat dirumuskan dari dan oleh orang luar tanpa melibatkan masyarakat.³⁸

Secara garis besarnya kegiatan pemberdayaan *top down* dapat dikategorikan menjadi dua fase yaitu perencanaan dan pelaksanaan. Pada *top down planning*, dari model perencanaan yang dilakukan adalah berasal dari atasan yang ditujukan kepada bawahannya dimana yang mengambil keputusan adalah atasan, sedangkan bawahan hanya sebagai pelaksana saja. Dalam pengertian lain terkait dengan pemberdayaan, *top down planning* adalah perencanaan yang dibuat oleh pemberdaya yang ditujukan kepada masyarakat sebagai pelaksana. Kemudian pendekatan ini mendesak bagian bawah bekerja sesuai kemauan atasan atau pemberdaya di dalam perencanaan tanpa mepedulikan situasi nyata bagian

³⁸ Malcolm Payne, *Teori Pekerjaan Sosial Modern*, terj. Susiladiharti, 204.

bawah. Waktu perencanaan bisa sangat pendek, tetapi ada banyak hal yang terlewatkan karena sempitnya forum informasi dan komunikasi. Biasanya menimbulkan kepatuhan yang terpaksa namun untuk sementara waktu efektif.³⁹

b. Model Pemberdayaan Dari Bawah Ke Atas (*Bottom Up*)

Proses pemberdayaan menuntut adanya keterlibatan dari masyarakat dalam memanfaatkan potensi yang ada semaksimal mungkin untuk mampu melakukan pembangunan secara mandiri. Namun modifikasi model pendekatan itu tidaklah mudah dan cepat seperti yang kita harapkan mengingat model pendekatan di atas telah cukup mengakar. Seiring dengan permasalahan di atas, kita mengenal model pendekatan yang disebut "*bottom up*" yakni suatu model yang mencoba melakukan koreksi dan melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada pada model pemberdayaan *top down*.

Model pendekatan yang kedua ini memakai konsep "partisipasi" sebagai kata kunci. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam rangka perencanaan dan penentuan kebijakan, atau dalam pengambilan keputusan. Model pendekatan *bottom up* dalam kegiatan pemberdayaan merupakan suatu pengkondisian dengan mengedepankan partisipasi masyarakat atau klien dalam setiap tahap kegiatan pemberdayaan dan mencoba melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan. Model *bottom up* memulai dengan situasi dan kondisi serta potensi lokal. Dengan kata lain model kedua ini menempatkan manusia sebagai subyek. Pendekatan "*bottom up*" lebih memungkinkan penggalan dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan. Hal ini disebabkan karena masyarakat lebih merasa

³⁹ Malcolm Payne, *Teori Pekerjaan Sosial Modern*, terj. Susiladiharti, 204.

“memiliki” dan merasa turut bertanggung jawab terhadap keberhasilan pembangunan, yang nota bene memang untuk kepentingan mereka sendiri.⁴⁰ Pendekatan menggunakan pada model ini memberikan kesan lebih manusiawi dan memberikan harapan yang lebih baik, namun tidak lepas dari kekurangannya.

Model *Bottom up* membutuhkan waktu yang lama dan belum menemukan bentuknya yang mapan. Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa model pemberdayaan *bottom up* berlawanan dengan model pemberdayaan *top down*. Selain dari pengertian yang berbeda, pada model ini pun memiliki tahapan yang berbeda dari model *top down*. *Bottom up planning* adalah perencanaan yang dibuat berdasarkan kebutuhan, keinginan dan permasalahan yang dihadapi oleh bawahan bersama-sama dengan atasan menetapkan kebijakan atau pengambilan keputusan dan atasan juga berfungsi sebagai fasilitator.

Bottom up planning atau perencanaan bawah dalam pengertian kegiatan pemberdayaan adalah perencanaan yang disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat sendiri dan pemberdaya hanya sebagai fasilitator. Dari bawah ke atas (*bottom-up*). Pendekatan ini merupakan upaya melibatkan semua pihak sejak awal, sehingga setiap keputusan yang diambil dalam perencanaan adalah keputusan mereka bersama, dan mendorong keterlibatan dan komitmen sepenuhnya untuk melaksanakannya. Kelemahannya memerlukan banyak waktu dan tenaga untuk perencanaan. Diperlukan pengembangan budaya perusahaan yang sesuai.⁴¹

⁴⁰ Ibid., 209.

⁴¹ Malcolm Payne, *Teori Pekerjaan Sosial Modern*, terj. Susiladiharti, 302.

Pada pelaksanaannya, model *bottom up* menggunakan paradigma pembelajaran Andragogi, yang langkah-langkahnya menurut Knowles sebagai berikut: Si pelajar bukan yang telah masuk secara psikologis hubungan belajar dengan pengajar merupakan hubungan saling membantu yang timbal balik; Pengalaman belajar orang dewasa dinilai sebagai sumber belajar yang kaya multi komunikasi oleh semua peserta pengajar maupun pelajar; Pelajar perlu mempelajari berdasarkan pada persepsi mereka sendiri terhadap tuntutan situasi sosial mereka tempat; Belajar merupakan proses untuk penemuan masalah dan pemecahan masalah pada saat itu juga pendekatannya (*problem centered*). Pada model ini, komunitas adalah aktor dalam kegiatan pelatihan. Teknik komunikasi yang dilakukan pada pendekatan ini menggunakan teknik komunikasi dua arah, yakni peserta lebih aktif dalam kegiatan pelatihan.

C. Konsep *Sustainable Development Goals* (SDGs)

1. Pengertian dan Tujuan *Sustainable Development Goals*

Secara sederhana, *sustainable development goals* (pembangunan berkelanjutan) didefinisikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Istilah ini pertama kali dipopulerkan dalam *Our Common Future*, sebuah laporan yang dipublikasikan oleh komisi dunia untuk lingkungan hidup dan Pembangunan *the World Commission on Environment and Development* (WCED) pada tahun 1987.⁴²

⁴² Joseph E Stglitz dkk. *Mengukur Kesejahteraan: Mengapa PDB bukan tolok ukur yang tepat menilai kemajuan?*. (Tangerang; Marjin Kiri, 2011), 154-155.

Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-70 pada bulan September 2015 di New York, Amerika Serikat, menjadi titik sejarah baru dalam pembangunan global. Sebanyak 193 kepala negara dan pemerintahan dunia hadir untuk menyepakati agenda pembangunan universal baru yang tertuang dalam dokumen berjudul *Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development*-berisi 17 Tujuan dan 169 Sasaran yang berlaku mulai tahun 2016 hingga tahun 2030. Dokumen ini dikenal dengan istilah *Sustainable Development Goals* atau SDGs.⁴³

SDGs adalah suatu rencana aksi untuk umat manusia, planet dan kemakmuran. Juga tujuannya untuk memperkuat perdamaian universal dalam kebebasan yang luas selain itu untuk mengatasi kemiskinan yang ekstrim adalah tantangan global yang paling besar dan merupakan prasyarat yang tidak dapat dilanjutkan untuk pembangunan berkelanjutan.⁴⁴ Pembangunan berkelanjutan tidak hanya berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan. Lebih luas daripada itu, pembangunan berkelanjutan mencakup tiga lingkup kebijakan: Pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan dapat dibedakan dengan pembangunan hijau dimana yang lebih mengutamakan keberlanjutan lingkungan di atas pertimbangan ekonomi dan budaya.

⁴³ Sekar Panuluh, Meila Riskia Fitri, *Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) Di Indonesia*, September 2015-September 2016, *Briefing Paper* 2, 2016, 4.

⁴⁴BAPPENAS, *Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah 2015- 2019*, (Jakarta, 2015). Diakses di http://www.bappenas.go.id/berita-dansiaranpers/berita_harianbappenas/konsep-sdgs-kerangka-pembangunan-pasca-2015/. Retrieved 25 Maret 2022.

Konsep SDGs itu sendiri lahir pada kegiatan konferensi mengenai pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh PBB di Rio de Janeiro tahun 2012. Tujuan yang ingin dihasilkan dalam pertemuan tersebut adalah memperoleh tujuan bersama yang universal yang mampu memelihara keseimbangan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan: lingkungan, sosial dan ekonomi.⁴⁵ SDGs hasil Deklarasi berisi 17 (tujuh belas) goals, jumlah goal yang banyak apabila dibandingkan dengan MDGs yang hanya 8 (delapan) goals. SDGs juga memiliki 166 target dengan indikator terukur, yang 61 diantaranya berupa cara pelaksanaan (means of implementations).⁴⁶ Berikut 17 tujuan dari SDGs:

- 1) Tanpa Kemiskinan (*No Poverty*). Tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia.
- 2) Tanpa Kelaparan (*Zero Hunger*). Tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan.
- 3) Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan (*Good Health and Well-Being*). Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur.
- 4) Pendidikan Berkualitas (*Quality Education*). Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.

⁴⁵ Ishartono dan Santoso Tri Raharjo, *Social Work Jurnal*, Vol. 6, No. 2, h. 154 – 272.

⁴⁶ Armida Salsiah Alisjahbana dan Endah Murniningtyas, *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia: Konsep Target dan Strategi Implementasi*, 60.

- 5) Kesetaraan Gender (*Gender Quality*). Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan.
- 6) Air Bersih dan Sanitasi (*Clean Water and Sanitation*). Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang.
- 7) Energi Bersih dan Terjangkau (*Affordable and Clean Energy*). Menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk semua orang.
- 8) Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak (*Decent Work and Economic Growth*). Mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, lapangan kerja yang penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua orang.
- 9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur (*Industry, Innovation and Infrastructure*). Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi.
- 10) Mengurangi Kesenjangan (*Reduced Inequalities*). Mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia.
- 11) Keberlanjutan Kota dan Komunitas (*Sustainable Cities and Communities*). Membangun kota-kota serta pemukiman yang inklusif, berkualitas, aman, berketahanan dan berkelanjutan.⁴⁷
- 12) Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab (*Responsible Consumption and Production*). Menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi.

⁴⁷ Ibid., 61.

- 13) Aksi Terhadap Iklim (*Climate Action*). Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.
- 14) Kehidupan Bawah Laut (*Life Below Water*). Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan pembangunan yang berkelanjutan.
- 15) Kehidupan di Darat (*Life On Land*). Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.
- 16) Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian (*Peace, Justice and Strong Institutions*). Meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.
- 17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (*Partnerships For The Goals*). Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.⁴⁸

2. Indikator dan Implementasi *Sustainable Development Goals*

SDGs memiliki 5 pondasi utama yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tiga tujuan mulia di tahun 2030

⁴⁸ Ibid., 62.

berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim. Kemiskinan masih menjadi isu penting dan utama, selain dua capaian lainnya. Untuk mencapai tiga tujuan mulia tersebut, disusunlah 17 Tujuan Global yang telah disebutkan sebelumnya.⁴⁹

Tujuan pertama dari *Sustainable Development Goals* adalah tanpa kemiskinan (*no poverty*) yaitu mengakhiri kemiskinan dimanapun dan dalam semua bentuk. Adapun target-target yang memuat tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Menghapus kemiskinan ekstrim (penduduk dibawah garis kemiskinan) dengan daya beli kurang dari \$1,25 PPP (*Purchasing Power Parity*) atau sekitar Rp. 7.800, per hari.
- b. Mengurangi setidaknya separuh dari jumlah penduduk miskin berdasarkan definisi nasional.
- c. Ditingkat nasional mengimplementasikan system dan ukuran perlindungan social yang tepat bagi semua level masyarakat.
- d. Memastikan semua penduduk, terutama penduduk miskin rentan mendapat hak serta mengakses sumber ekonomi, kepemilikan dan akses pada lahan.
- e. Membangun layanan keuangan yang dibutuhkan termasuk keuangan mikro, daya tahan kesiapan masyarakat miskin dan kelompok rentan menghadapi perubahan iklim, krisis lingkungan, ekonomi, social, dan bencana.

⁴⁹ Ayu Oktaviani Musri, *Pelaksanaan Program Sustainable Development Goals Sdgs Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Mengurangi Kemiskinan*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020, .31.

Dari 17 tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs), terdapat 109 indikator utama dan 111 indikator tambahan yang diusulkan pada publikasi *Sustainable Development Solution Network* (SDSN), indikator utama dan tambahan untuk SDGs tersebut dapat dipetakan kedalam 40 target. Dari indikator usulan SDSN tersebut terdapat 73 indikator utama dan 62 indikator tambahan yang ada di Indonesia. Berkurangnya jumlah indikator disebabkan ketidakterediaan indikator, adanya indikator untuk lembaga tertentu, indikator global atau internasional, indikator untuk Negara maju, dan untuk Negara berpendapatan tinggi.⁵⁰

Peran negara sangat krusial dalam memastikan bahwa pelaksanaan SDGs berdasarkan pada pendekatan dan strategi yang holistik antara pembangunan ekonomi, inklusi sosial, dan keberlanjutan lingkungan dengan tetap mengedepankan pada karakteristik dan prioritas tiap-tiap negara. Belajar dari pengalaman MDGs sebelumnya, Indonesia kini berusaha menghindari keterlambatan pengimplementasian SDGs. Sebelumnya pelaksanaan MDGs di Inonesia mengalami keterlambatan sepuluh tahun dari pengesahannya di tahun 2000.⁵¹

Pemerintah Indonesia menjelaskan bahwa keterlambatan ini disebabkan karena Indonesia masih dalam pemulihan situasi ekonomi pasca krisis 1998. Kali ini pemerintah telah menunjukkan keseriusan pelaksanaan SDGs yang tepat waktu, diawali dengan hadirnya Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam Sidang Umum

⁵⁰ Agus Sutopo, S.ST, Dkk, *Kajian Indikator Sustainable Development Goals (Sdgs)*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2014), 127.

⁵¹ Sekar Panuluh, Meila Riskia Fitri, *Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) Di Indonesia*, 11.

PBB untuk penandatanganan SDGs pada September 2015 lalu. Dengan demikian, untuk mencapai 17 Tujuan dan 169 Sasaran SDGs pada tahun 2030 masih banyak hal lagi yang perlu dilakukan. Seperti misalnya mengarusutamakan SDGs dalam agenda pembangunan nasional; membuat pelaksanaan SDGs yang inklusif dan partisipatif baik di tingkat pusat maupun daerah; memastikan SDGs dilakukan dengan semangat transformatif dan no one left behind. Stakeholder lain juga terlihat sangat aktif berpartisipasi dan mendorong pemerintah untuk membuka ruang-ruang yang telah disediakan dalam proses SDGs global.

Wujud dari konsep pembangunan berkelanjutan di antaranya adalah menjaga keseimbangan antara fungsi ekologi, ekonomi bahwa dimensi lingkungan dalam pembangunan yang berkelanjutan perlu diperhatikan, pembangunan tidaklah serta merta dilakukan tanpa memikirkan dan melihat aspek lainnya yaitu lingkungan dan kehidupan makhluk hidup lainnya. Menerapkan pembangunan berwawasan lingkungan adalah salah satu usaha mempertahankan fungsi lingkungan untuk tetap dapat dimanfaatkan pada masa yang akan datang.⁵²

Dalam merealisasikan hal tersebut pemerintah membuat konsep kebijakan peduli lingkungan. Pemerintah Daerah dan berbagai stakeholder lainnya mulai bertindak ke arah perbaikan lingkungan melalui berbagai program, seperti: pengelolaan persampahan melalui bank sampah dan kegiatan 3R, atau kegiatan konservasi ekosistem, seperti: ekosistem mangrove, padang lamun, terumbu karang, dan lainnya. Dalam rangka pengelolaan suatu ekosistem Pemerintah

⁵² Etika Khairina, Eko Priyo Purnomo & Ajree Ducol Malawani, *Sustainable Development Goals: kebijakan berwawasan lingkungan guna menjaga ketahanan lingkungan dikabupaten bantul daerah istimewa Yogyakarta*, *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 26, No. 2, Agustus 2020, 158.

Daerah harus didukung oleh masyarakat setempat. Masyarakat adalah subjek utama dalam kegiatan pengelolaan sumber daya alam, mengingat masyarakat hidup berdampingan langsung dengan alam sehingga merasakan langsung dampak positif dan negatif dari kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam.⁵³

Kegiatan yang terencana, terpadu dan sistematis untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan menjaga kelestarian fungsi lingkungan, tanpa mengurangi akses dan manfaat untuk generasi yang akan datang menjadi cara pandang atau acuan pemerintah dan masyarakat serta pihak yang terlibat di dalamnya untuk merealisasikan Kebijakan berwawasan lingkungan dan sebagai wujud dari konsep pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*). Konsep pembangunan berkelanjutan sebagai upaya menjaga ketahanan lingkungan diharapkan akan mampu membantu persoalan lingkungan dan keberlangsungannya kehidupan. Kebijakan pembangan berkelanjutan berkaitan dan bertujuan langsung untuk menjaga kehidupan manusia keseimbangan sumberdaya alam, kelestarian lingkungan. Mengingat sumberdaya alam sebagai bagian atau elemen dari ketahanan nasional, dalam bentuk ketahanan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan merupakan agenda politik pembangunan dunia atau pembangunan global. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah menjadi bagian dari pembangunan dunia, sehingga harus sejalan dan menjadi panduan dalam menjaga keberlangsungan dan kelestarian fungsi lingkungan.⁵⁴

⁵³ Ibid, 159.

⁵⁴Etika Khairina, Eko Priyo Purnomo & Ajree Ducol Malawani, *Sustainable Development Goals: kebijakan berwawasan lingkungan guna menjaga ketahanan lingkungan dikabupaten bantul daerah istimewa Yogyakarta*, 159.

BAB III
PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN DALAM KONSEP *SUSTAINABLE*
***DEVELOPMENT GOALS (SDGs)* DI DESA KARANGPATIHAN**
KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Demografi

Lokasi penelitian yang digunakan peneliti terletak di desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan letak geografis, Desa Karangpatihan berada diwilayah Selatan Kabupaten Ponorogo yang secara administratif memiliki luas wilayah ± 1.336,6 ha, dan ketinggian wilayah 7 mdpl di daerah rendah dan 153,3 mdpl (diatas permukaan laut). Kondisi cuaca dan klimatologi di desa karangpatihan memiliki suhu rata-rata harian 31°C.¹ Desa Karangpatihan meliputi 4 dusun yakni Krajan, Bibis, Bendo, dan Tanggungrejo. Total jumlah penduduk desa Karangpatihan per November 2020 adalah 5.845 jiwa yang terdiri dari 2.811 laki-laki dan 3.034 perempuan dengan jumlah kepala keluarga 1.870.

Adapun luas wilayah Desa Karangpatihan adalah 1336,6 Ha (hektar) dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

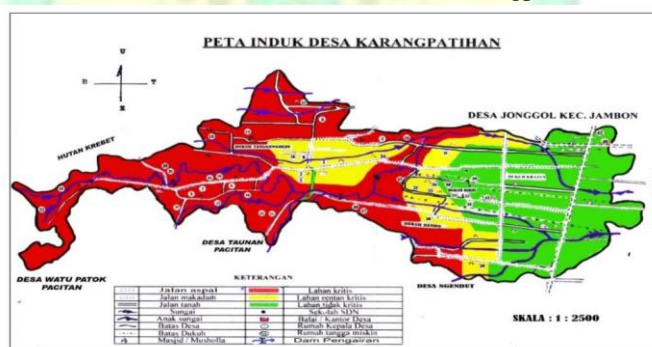
- 1) Sebelah utara berbatasan dengan desa Jonggol, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo.

¹ Profil Desa Karangpatihan, 2022.

- 2) Sebelah selatan berbatasan dengan desa Ngendut, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo; Desa Taunan dan Desa Watu Patok, Kabupaten Pacitan.
- 3) Sebelah timur berbatasan dengan desa Sumberejo, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo.
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan hutan Krebet.

Batas-batas Desa Karangpatihan dapat dilihat dengan lebih jelas pada gambar berikut ini:

Gambar 3.1: Peta Desa Karangpatihan



Sumber: profil desa Karangpatihan tahun 2020

2. Kondisi Sumber Daya Alam

Kondisi tanah di desa Karangpatihan tergolong tandus, yang mana apabila ditanami hasilnya tidak maksimal. Sehingga meskipun sumber daya alam yang ada terbilang banyak, kendalanya terdapat pada kondisi tanah yang tidak produktif dan kualitas air yang tidak bagus. Kondisi potensi alam di Desa Karangpatihan cukup bervariasi meliputi bahan galian (batu), mata air (mata air, sumur, dan air gunung). Sedangkan untuk hasil bumi (mangga, jagung, padi, jeruk, kayu jati, kacang, melon, dll), dan untuk wisata alam terdapat (hutan

pinus dan curug). Untuk lebih jelasnya terkait kondisi sumber daya alam di desa ini dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.1: Data Monografi Sumber Daya Alam Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

| No | Nama Dusun | Jenis Sumber Daya Alam | | | |
|----|--------------|------------------------|------------|------------|-------------|
| | | Bahan Galian | Mata Air | Hasil Bumi | Wisata Alam |
| 1. | Bendo | | Mata Air | Mangga | Wisata Beji |
| | | | Sumur | Jeruk | |
| | | | | Jagung | |
| | | | | Kacang | |
| | | | | Padi | |
| | | | | Singkong | |
| 2. | Bibis | | Sumur | Mangga | |
| | | | | Jeruk | |
| | | | | Melon | |
| | | | | Padi | |
| | | | | Kacang | |
| | | | | Kakao | |
| | | | | Pisang | |
| | | | | Cabai | |
| | | | | Singkong | |
| 3. | Krajan | | Sumur | Padi | |
| | | | | Mangga | |
| | | | | Kacang | |
| | | | | Jagung | |
| | | | | Singkong | |
| 4. | Tanggungrejo | Batu | Sumur | Jeruk | Hutan Pinus |
| | | | Air gunung | Sayuran | Air terjun |
| | | | | Kacang | |
| | | | | Pisang | |
| | | | | Padi | |
| | | | | Jagung | |
| | | | | singkong | |

Sumber: hasil pendataan dan transek tahun 2020

B. Pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Tunagrahita Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

Sejak tahun 2008 Desa Karangpatihan dikenal sebagai kampung idiot. Sebutan ini pertama muncul di sebuah artikel setelah fenomena ratusan warganya terkonfirmasi sebagai warga keterbelakangan mental atau tunagrahita. Setelah fenomena tersebut, Masyarakat luar desa Karangpatihan lebih mengenal dengan sebutan kampung idiot.

Saat ini, berdasarkan data penduduk desa Karangpatihan tahun 2020 dari total penduduk 5.845 jiwa terdapat 96 warganya sebagai penyandang disabilitas intelektual atau tunagrahita. Jumlah tersebut merupakan jumlah keseluruhan dari klasifikasi tunagrahita ringan, sedang dan berat. Tunagrahita merupakan orang-orang yang memiliki hambatan intelektual, tetapi mereka masih mempunyai potensi yang dapat dikembangkan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki dan sesuai dengan kebutuhan mereka.²

Tabel 3.2: Data warga Tunagrahita dalam kegiatan pemberdayaan

| No. | Nama | Umur | Jenis Kelamin | | Pendidikan |
|-----|---------|------|---------------|---|------------|
| | | | L | P | |
| 1. | Boini | 34 | | ✓ | SLB |
| 2. | Misidi | 36 | ✓ | | SLB |
| 3. | Wagi | 35 | | ✓ | SD |
| 4. | Parmi | 37 | | ✓ | SD |
| 5. | Siyem | 40 | | ✓ | SLB |
| 6. | Partini | 38 | | ✓ | SD |
| 7. | Semok | 38 | | ✓ | - |
| 8. | Mesirah | 35 | | ✓ | SD |
| 9. | Suratun | 40 | | ✓ | SD |
| 10. | Katimun | 42 | ✓ | | SD |
| 11. | Suji | 33 | ✓ | | SLB |

² Nunung apriyanto, seluk beluk tunagrahita dan strategi pembelajarannya

| | | | | | |
|-----|---------|----|---|--|-----|
| 12. | Bodong | 30 | ✓ | | SD |
| 13. | Wandi | 29 | ✓ | | SLB |
| 14. | Meswan | 33 | ✓ | | SD |
| 15. | Bagas | 28 | ✓ | | - |
| 16. | Bodong | 32 | ✓ | | SD |
| 17. | Parman | 44 | ✓ | | SMP |
| 18. | Meslan | 37 | ✓ | | SD |
| 19. | Yatemun | 41 | ✓ | | SMP |

Sumber: Data LKS Rumah Harapan Mulya diolah peneliti

Dari jumlah 96 warga penyandang tunagrahita di Desa Karangpatihan, jumlah tunagrahita berat adalah yang paling sedikit. Penyandang tunagrahita berat ini sudah tidak bisa diberdayakan sama sekali, karena untuk memenuhi kebutuhan dasar saja mereka harus bergantung kepada orang lain. Akan tetapi, pemerintah desa membuat kebijakan dengan tetap memberikan *supplay* sembako berupa kebutuhan pokok setiap bulan. untuk membantu keluarganya. Berikut cuplikan wawancara dengan pak eko:

“Tunagrahita berat sudah ndak bisa kita berdayakan. Namanya berat kan mereka ndak bisa apa-apa. Mereka yang kategori berat ini taunya ya Bahagia, tiap hari ketawa tersenyum tok. Untuk kebutuhan dasar saja mereka harus dibantu keluarganya kan. Tapi kita tetep memberikan *supplay* beras kepada mereka setiap bulanya yang insyaallah cukup untuk kebutuhan sebulan”.³

Warga penyandang tunagrahita di Desa Karangpatihan tersebar di 4 dusun, yakni dusun Bendo, dusun Bibis, Dusun Karajan dan dusun Tanggungrejo. Warga dengan penyandang keterbatasan mental serta intelektual atau tunagrahita ini, sebelum adanya pemberdayaan, untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan segala

³ Eko Mulyadi, Wawancara, (Desa Karangpatihan Ponorogo Pada Tanggal 5 September 2023).

keterbatasan yang ada. Yakni bergantung dari bantuan tetangga dan juga minta-minta. Berikut cuplikan wawancara dengan ibu Yuliana:

“Dulu sebelum adanya pemberdayaan ya mereka bergantung dari bantuan tetangga dan minta minta seperti itu, Jadi memang masih kurang lah dulu kan masih Krisis ya pada zaman itu, jadi sebetulnya semuanya serba kekurangan”.⁴

Berdasarkan penjelasan ibu Yuliana tersebut, kondisi warga tunagrahita sebelum adanya pemberdayaan bisa dibilang memprihatikan. Warga tunagrahita tersebut hanya mengandalkan hidupnya pada keluarga meeka serta bantuan konsumtif dari pihak ketiga. Beberapa dari warga tunagrahita ada yang bekerja sebagai buruh tani, akan tetapi hasilnya tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Setiap habis masa panen, para tunagrahita tidak lagi mempunyai pekerjaan, mereka menjadi pengangguran dan hanya bisa berjalan-jalan tanpa mendapatkan penghasilan. Terlebih keadaan ini ditunjang oleh kondisi mereka sebagai tunagrahita yang tidak memungkinkan bekerja menggunakan kecerdasan. Hal itulah yang kemudian membuat pemerintah desa dan masyarakat bergerak untuk melakukan pemberdayaan terhadap warga tunagrahita. dengan tujuan tentu untuk menjadikan warga tunagrahita mandiri, dengan keterampilan yang dilatih melalui pemberdayaan.

Kegiatan pemberdayaan di desa Karangpatihan mulai dilakukan pada tahun 2010, dimana pada sat itu pak Eko belum menjabat sebagai kepala desa. Beliau sebagai ketua organisasi Masyarakat yang mengajak

⁴ Yuliana, Wawancara, (Desa Karangpatihan Ponorogo Pada Tanggal 23 Agustus2023).

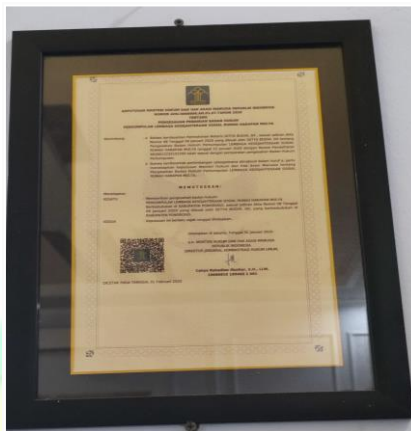
pemuda desa untuk Bersama-sama melakukan pemberdayaan terhadap warga tunagrahita.

“Kalau sebelumnya saya dulu membentuk Namanya komnas karangpatihan bangkit pada tahun 2010 saya sebagai ketua, pada saat itu masih lele saja. Kemudian karena 2013 saya kepala desa saya ganti komnas itu. Kemudian dibentuklah kelompok masyarakat rumah harapan itu ya, ketuanya bu Yuliana kemudian tahun 2016 mulai ngurus perizinannya menjadi lembaga. Akhirnya sekarang menjadi lembaga kesejahteraan sosial rumah harapan mulya sk kemenkumham nomor AHU-0000906.AH.01. 07.Tahun 2020”.⁵

Berdasarkan penuturan Pak Eko tersebut dapat diketahui bahwa pemberdayaan di Desa karangpatihan lahir dari kepeduliannya terhadap kondisi wrga tunagrahita di desa Karngpatihan tersebut. Program pemberdayaan yang pertama kali dilakukan adalah ternak lele. Kemudian pada tahun 2011 mendapat bantuan dana CSR Bank Indonesia Kediri, yang kemudian digunakan untuk membuat kolam lele di setiap rumah warga tunagrahita. Kemudian muali tahun 2013, tepatnya ketika pak Eko menjabat sebagai kepala desa, program pemberdayaannya semakin dikembangkan dengan membentuk kelompok masyarakat rumah harapan yang diketuai oleh ibu Yuliana. Lalu pada tahun 2016 mulai mengurus perizinan untuk menjadikan sebuah lembaga kesejahteraan sosial. Dan akhirnya sekarang sudah menjadi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Rumah Harapan Mulya dengan SK Kemenkumham Nomor. AHU-0000906.AH.01. 07.Tahun 2020.

⁵ Eko Mulyadi, Wawancara, (Desa Karangpatihan Ponorogo Pada Tanggal 5 September 2023).

Gambar 3.2. SK LKS rumah Harapan Mulya



Sumber: Data Dokumen LKS Rumah Harapan Mulya

Kegiatan pelatihan program-program pemberdayaan dilakukan di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Rumah Harapan Mulya, yang didirikan oleh masyarakat setempat secara gotong-royong untuk memfasilitasi warga tunagrahita agar mendapatkan pelatihan. Tanah yang digunakan untuk mendirikan LKS tersebut merupakan tanah wakaf dari salah satu warga desa Karangpatihan, yaitu tanah milik pak Wagiman yang merupakan orangtua Pak Eko. Sedangkan untuk modal awal dalam kegiatan pemberdayaan warga tunagrahita berasal dari swadaya yang kemudian data ng donator yang memberikan sumbangan dan CSR (*Corporate Social Responsibility*), sebagaimana yang dikatan pak samuji berikut ini:

“Modalnya itu awalnya swadaya dari donatur, sumbangan warga desa sekitar sini, ada juga CSR.”⁶

Hal tersebut juga diperkuat oleh pernyataan bapak Paimin yang merupakan salah satu anggota pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial Rumah Harapan Mulya. Berikut kutipan wawancara beliau:

⁶ Samuji, Wawancara, (Desa Karangpatihan Ponorogo Pada Tanggal 23 Agustus 2023).

“terkait modal pelaksanaan kegiatan ini, awalnya kita dapat dana CSR dari bank BI dengan dibutuh budidaya ikan lele, selain itu ada juga donator-donatur serta swadaya dari Masyarakat sendiri yang ikut mengembangkan kegiatan pemberdayaan di Rumah Harapan ini”.⁷

Pernyataan tersebut kemudian dikuatkan oleh penuturan Ibu Yuliana, berikut penggalan wawancara beliau:

“Dana pemberdayaan berasal dari pemerintah desa, CSR BI, donasi dan relawan”.

Kemudian peneliti melanjutkan pertanyaan terkait modal usaha, apakah sampai saat ini tidak ada campur tangan pemerintah? kemudian Ibu Yuliana menjelaskan sebagai berikut:

“iya kan kalau awal mula kan swadaya, jadi kalau dari pemerintah itu kita support oleh pemerintah mulai tahun kemarin ya tahun 2021, jadi dari Dinas Sosial secara khusus memberi bantuan”.⁸

Dari penjelasan wawancara tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pembentukan modal untuk melakukan kegiatan pengembangan dan kegiatan pemberdayaan warga tunagrahita di desa Karangpatihan adalah dari donator-donatur, CSR, serta swadaya dari Masyarakat desa Karangpatihan. Untuk lebih memaksimalkan kegiatan pemberdayaan warga tunagrahita tersebut, mulai tahun 2021 Dinas Sosial memberi bantuan secara khusus dengan harapan mempermudah pelaksanaan kegiatan pemberdayaan warga tunagrahita. Terkait modal yang dijelaskan pak Samuji bahwa perputaran dananya berasal dari usaha yang mereka jalankan. Jadi Sebagian hasil usaha digunakan untuk upah

⁷ Paimin, Wawancara, (Desa Karangpatihan Ponorogo Pada Tanggal 29 Agustus 2023).

⁸ Yuliana, Wawancara, (Desa Karangpatihan Ponorogo Pada Tanggal 23 Agustus 2023).

pembuat (tunagrahita), sedangkan Sebagian lainnya digunakan untuk penambahan modal.

Sejak mulai dikembangkannya program pemberdayaan di Desa Karangpatihan yakni tahun 2013, proses pemberdayaan tersebut sampai saat ini masih tahap pelatihan. Program pemberdayaan tersebut cenderung lebih lama apabila dibandingkan pemberdayaan pada umumnya, sebab yang diberdayakan adalah warga tunagrahita. Waktu yang dibutuhkan warga tunagrahita untuk bisa mengikuti program pemberdayaan berbeda-beda, tergantung kemampuan individu. Begitu juga dengan kuantitas dan kualitas produk yang dihasilkan tidak bisa dihitung secara matematis karena tergantung kemampuan dan kemauan warga tunagrahita.

Dalam rangka menumbuhkan keterampilan warga tunagrahita agar dapat melakukan kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka LKS rumah Harapan Mulya memberikan beberapa pelatihan kegiatan usaha, dalam proses pelatihan mereka mengajarkannya dengan cara praktek yang sederhana dan menyesuaikan dengan kondisi warga miskin keterbelakangan mental atau tunagrahita yang diberdayakan. Berdasarkan hasil wawancara dan juga pengamatan peneliti, disini terdapat beberapa kegiatan pelatihan yang diberikan kepada mereka sebagai berikut:

1. Pembudidayaan Ternak Lele

Berdasarkan keterangan dari Pak Eko bahwa kegiatan usaha yang pertama dilakukan adalah ternak lele. Hal ini berdasarkan

inisiatifnya sendiri yang kemudian mengajak pemuda desa untuk melakukan pemberdayaan terhadap warga tunagrahita. Kegiatan ternak lele merupakan kegiatan pemberdayaan yang sifatnya triwulan sebab dalam waktu 3 bulan sudah bisa panen. Berawal dari bantuan dana CSR Bank Indonesia yang kemudian digunakan untuk berternak lele. Setiap keluarga tunagrahita dibuatkan kolam lele kecil dengan ukuran 1×2 m. Dari kegiatan ternak lele tersebut, keluarga tunagrahita bisa mendapatkan penghasilan kisaran Rp 100.000 hingga Rp. 250.000 setiap kali panen.⁹

Dalam kegiatan budidaya ternak lele ini warga tunagrahita dapat menjalankan proses budidaya dengan dibantu oleh pendamping dan Masyarakat setempat. Pendamping dari LKS Rumah Harapan Mulya memberikan pembinaan dalam kegiatan budidaya lele dengan melatih kepada warga tunagrahita dengan menggunakan Bahasa isyarat, mulai dari pemberian pakan, perawatan kolam, hingga proses pemanenan lele. Warga tunagrahita yang dapat mengikuti pelatihan ini adalah tunagrahita ringan dan sedang.

2. Pembudidayaan Ternak Kambing

Selain kegiatan pembudidayaan ikan lele, warga tunagrahita juga diberikan pelatihan berupa budidaya ternak kambing yang merupakan kegiatan pemberdayaan dengan hasil produksi tahunan.

Mengutip keterangan dari bapak teguh selaku penanggungjawab

⁹ EM Chanel, Kick Andy Metro Tv Eko Mulyadi Pemberdaya Penyandang Tunagrahita, 20 Desember 2013, Dalam <https://www.youtube.com/watch?v=R2w2E8f5Aio> Diakses Pada 30 Agustus 2023.

program ternak kambing, beliau menjelaskan bahwa tehnik pelatihan yang digunakan dari pengurus untuk ternak kambing adalah dengan cara penyuluhan, yaitu memberikan 1 ekor kambing kepada setiap keluarga tunagrahita. kemudian ada 5 ekor kambing indukan yang digilir dan dipelihara bergantian sampai kambing tersebut beranak, baru kemudian induk kambing bisa berpindah ke warga selanjutnya.

Berikut petikan wawancara dari beliau:

“kalau untuk kambing semua keluarga tunagrahita bisa mendapatkan dengan cara begini misalkan setiap anggota kelompok terdiri dari 10 orang, kemudian itu nanti diberikan 15 ekor kambing. Jadi setiap orang mendapat satu-satu, nah yang 5 itu nanti digilir. Setelah yang 5 beranak yang sebai induk digilir diberikan kepada warga yang lain, sedangkan anaknya jadi milik yang memelihara. Dan kambing itu baru boleh dijual setelah beranak, kami menghimbau untuk pantang dijual sebelum beranak”.¹⁰

Dari keterangan diatas dapat diketahui bahwa budidaya ternak kambing ini sistemnya kelompok. Jadi setiap warga tunagrahita cukup mencari rumput untuk pakan kambing. Untuk mencari pakan berupa rumput ini kebanyakan warga tunagrahita sudah bisa tanpa perlu diberikan teori atau arahan. Dalam hal ini pendamping hanya memberikan konsep sebagaimana yang disebutkan diatas. Dari hasil ternak kambing ini Masyarakat bisa mendapatkan hasil produksi setelah sekitar 1 tahun. Semua akan merasakan hasil dan mendapatkan penghasilan setelah mereka berhasil membuat kambingnya beranak.

¹⁰ Teguh Cahyono, Wawancara, (Desa Karangpatihan Ponorogo Pada Tanggal 29 Agustus2023).

3. Kerajinan Tangan Kesen

Selain ternak lele dan juga ternak kambing, selanjutnya dikembangkan pula kegiatan usaha yang sifatnya harian atau mingguan. Kegiatan ini bertujuan agar keluarga tunagrahita mendapatkan hasil produksi harian atau mingguan. Sehingga dibuatlah kegiatan usaha berupa kerajinan tangan keset. Keset merupakan salah satu kerajinan yang bisa digunakan dan dimanfaatkan dalam kehidupan rumah tangga, dengan bermodalkan kain perca bisa dijadikan kerajinan berupa keset. Saat ini, dalam pembuatan keset rata-rata mereka produksi dirumah masing-masing. Sebagaimana penuturan pak samuji berikut ini:

“untuk pembuatan keset, mereka dikerjakan dirumah masing-masing. Jadi tiap hari mereka bikin dirumah, nah pas ada kunjungan atau kumpulan ya membuatnya di rumah harapan. Sekarang sudah banyak yang lancar ya buatnya kadang sudah menghasilkan 2-5 juga, tapi ya macem-macem tergantung kemauan juga”.¹¹

Dengan pelatihan dan proses yang sederhana, mereka dikumpulkan dan dilatih oleh pendamping dan juga volunteer dari LKS Rumah Harapan Mulya. Proses pelatihan dilakukan satu persatu dengan pemberian pemahaman terkait proses pemilihan warna, pemasangan alat, perangkaian, hingga pada proses akhir yakni pengancingan. Satu buah keset yang sudah jadi akan dijual seharga Rp. 15.000 – Rp. 20.000, dengan rincian Rp. 8.000 untuk pembuat

¹¹ Samuji, Wawancara, (Desa Karangpatihan Ponorogo Pada Tanggal 23 Agustus 2023).

sedangkan sisanya dimasukkan kedalam kas LKS Rumah Harapan Mulya yang kemudian digunakan untuk perputaran modal selanjutnya.

Tabel 3.3. Data Warga Tunagrahita Pembuat Kerajinan Kesen

| No | Nama | Alamat dukuh | Produk kerajinan |
|-----|----------|--------------|------------------|
| 1. | Boini | Tanggungrejo | Kerajinan keset |
| 2. | Mesidi | Tanggungrejo | Kerajinan keset |
| 3. | Mesiyem | Tanggungrejo | Kerajinan keset |
| 4. | Jamun | Tanggungrejo | Kerajinan keset |
| 5. | Mesirah | Tanggungrejo | Kerajinan keset |
| 6. | Bodong A | Tanggungrejo | Kerajinan keset |
| 7. | Wandi | Tanggungrejo | Kerajinan keset |
| 8. | Suratun | Tanggungrejo | Kerajinan keset |
| 9. | Katimun | Tanggungrejo | Kerajinan keset |
| 10. | Parmi | Tanggungrejo | Kerajinan keset |
| 11. | Kampret | Krajan | Kerajinan keset |
| 12. | Meslan | Bibis | Kerajinan keset |
| 13. | Sofyan | Bendo | Kerajinan keset |
| 14. | Semok | Bendo | Kerajinan keset |

Sumber: Data LKS Rumah Harapan Mulya diolah peneliti

4. Kerajinan Tangan Tasbih

Kegiatan usaha kerajinan tangan tasbih ini konsep kegiatannya sama dengan kerajinan tangan keset. Yakni konsep kegiatan usaha yang memberikan hasil produksi harian atau mingguan. Tasbih merupakan salah satu bentuk hasil kerajinan tangan yang terbuat dari manik-manik kemudian dirancang menggunakan benang bening. Harga per tasbih sebesar Rp. 8.000, sedangkan warga tunagrahita yang membuat akan diberikan upah sebesar Rp. 4.000 per tasbih. Untuk membuat tasbih diperlukan kreatifitas menghitung jumlah manik-manik hingga 33. Awalnya Masyarakat bisa mengerjakannya namun banyak yang tidak teliti sehingga terkadang jumlahnya tidak sesuai. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh pak Samuji:

“Kerajinan tabih ini kan untuk merangsang pikiran para tunagrahita, dengan menghitung jumlah manik-manik untuk membuat tasbih. Kemaren sempet diajarkan kepada Mesidi, Bagas, Meswan, Bodong, kan pengerjaanya gak lama ya. Nah ada cerita lucu saat kita latih, kan waktu menghitung kita tungguin, tapi pas kita lengah mengajari yang lain malah ada yang membuat dengan jumlah 26 bahkan ada yang hanya 23. Tapi apapun bentuk dan hasilnya tetap kita jual ya, kan itu hasil dari teman-teman tunagrahita”.¹²

Sampai saat ini, pembautan kerajinan tangan berupa tasbih masih berjalan meskipun sedikit, warga tunagrahita tetap dilatih dan dipantau dengan sabar oleh para pendamping agar bisa memproduksi tasbih dengan baik.

Tabel 3.4. Data Warga Tunagrahita Pembuat Kerajinan Tasbih

| No | Nama | Alamat dukuh | Jenis kelamin | Produk kerajinan |
|----|---------|--------------|---------------|------------------|
| 1. | Suratun | Tanggungrejo | Perempuan | Tasbih |
| 2. | Mesidi | Tanggungrejo | Laki-laki | Tasbih |
| 3. | Meswan | Tanggungrejo | Laki-laki | Tasbih |
| 4. | Bagas | Tanggungrejo | Laki-laki | Tasbih |
| 5. | Bodong | Tanggungrejo | Laki-laki | Tasbih |
| 6. | Parmin | Bendo | Laki-laki | Tasbih |

Sumber: Data LKS Rumah Harapan Mulya diolah peneliti

5. Kerajinan Batik Ciprat

Batik Ciprat Karangpatihan adalah sebuah karya yang lahir dari sebuah problematika sosial yaitu keberadaan warga disabilitas yang hidup dibawah garis kemiskinan. Upaya untuk mengangkat taraf hidup penyandang disabilitas dilakukan oleh tokoh lokal desa Karangpatihan yaitu Ibu Yuliana Eko Mulyadi dengan memberdayakan warga disabilitas intelektual melalui berbagai kegiatan ekonomi, salah satunya adalah dengan memproduksi batik

¹² Samuji, Wawancara, (Desa Karangpatihan Ponorogo Pada Tanggal 23 Agustus 2023).

ciprat mulai tahun 2016. Batik ciprat dengan konsep menciprat ini dipandang mudah untuk dipelajari warga disabilitas intelektual dan terbukti sekarang mereka sudah berhasil melahirkan karya batik ciprat karangpatihan dengan berbagai motif mulai dari abstrak, Binatang, wayang, tumbuhan dan lain-lain.¹³

Tabel 3.5. Data Warga Tunagrahita Pembuat Kerajinan Batik

| No | Nama | Alamat dukuh | Jenis kelamin | Produk kerajinan |
|----|---------|--------------|---------------|------------------|
| 1. | Boini | Tanggungrejo | Perempuan | Batik ciprat |
| 2. | Wagi | Tanggungrejo | Perempuan | Batik ciprat |
| 3. | Partini | Tanggungrejo | Perempuan | Batik ciprat |
| 4. | Mesirah | Bendo | Perempuan | Batik ciprat |
| 5. | Meslan | Tanggungrejo | Laki-laki | Batik ciprat |
| 6. | Parmin | Bendo | Laki-laki | Batik ciprat |
| 7. | Mesidi | Tanggungrejo | Laki-laki | Batik ciprat |

Sumber: Data LKS Rumah Harapan Mulya diolah peneliti

Dalam proses pembuatan batik ciprat ini warga tunagrahita mendapat pendampingan penuh mulai dari proses persiapan pemanasan cat, pembuatan batik ini dengan cara diciprat-ciprat menggunakan kuas selanjutnya diberi waterglos dan pencucian. Dalam pembuatan ini memerlukan beberapa Teknik sehingga prosesnya sesuai dengan tehnik yang telah dijelaskan. Berdasarkan keterangan ibu Yuliana, kerajinan batik ini masih baru. Akan tetapi hasil produksi batik ciprat telah didistribusikan hingga kancan nasional. Untuk harga jual batik ciprat adalah Rp. 175.000 per lembar

¹³ <https://batikcipratkarangpatihan.id/> diakses 07 September 2023, 15:35.

dengan ukuran Panjang 210 cm dan lebar 115 cm dengan bahan katun primisima.¹⁴

Dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan, warga tunagrahita hanya berperan sebagai pelaksana program pemberdayaan. Mereka harus melakukan program pemberdayaan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun oleh pemerintah. Hal demikian tentu dengan pertimbangan kemampuan berfikir para tunagrahita, sebagaimana dijelaskan ibu Yuliana berikut ini:

“Temen-temen tunagrahita itu kan hanya buat saja ya, kalau untuk hasilnya Kembali lagi ke Rumah Harapan. Jadi yang memasarkan itu ya para pendamping”.¹⁵

Dari pernyataan tersebut kemudian dikuatkan oleh Pak Eko, sebagaimana kutipan wawancara berikut ini:

“kalau memasarkan bukan urusan mereka, sudah ada tim yang menangani penjualannya melalui rumah harapan dan juga BUMDes”.¹⁶

Dari penjelasan diatas dapat kita pahami bahwa warga tunagrahita berperan sebagai pelaksana program pemberdayaan, mereka harus melaksanakan program sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Sedangkan untuk hasil dari kegiatan pemberdayaan tersebut Kembali ke LKS Rumah Harapan Mulya yang selanjutnya didistribusikan oleh tim yang bertugas. Teknik komunikasi yang dilakukan dalam kegiatan ini satu arah artinya dari pemerintah desa

¹⁴ <https://batikcipratkarangpatihan.id/> diakses 07 September 2023, 15:35.

¹⁵ Yuliana, Wawancara, (Desa Karangpatihan Ponorogo Pada Tanggal 23 Agustus 2023).

¹⁶ Eko Mulyadi, Wawancara, (Desa Karangpatihan Ponorogo Pada Tanggal 5 September 2023).

sebagai pemberdaya yang menentukan apa, bagaimana, serta kapan dilaksanakannya program pemberdayaan.

C. Faktor Pendorong Dan Penghambat Serta Dampak Pemberdayaan Terhadap Ekonomi Keluarga Tunagrahita

1. Faktor Pendukung

Dalam suatu kegiatan pemberdayaan tentu terdapat hal yang mendukung serta hal dapat menghambat tercapainya kegiatan pemberdayaan yang telah direncanakan. Sebagaimana yang terjadi dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga tunagrahita di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) rumah Harapan Mulya. Berikut penuturan dari Pak Eko:

“faktor pendorong kita punya sumber daya manusia (relawan-relawan) yang sangat semangat dalam membantu memberdayakan teman-teman tunagrahita”.¹⁷

Pernyataan tersebut sesuai dengan apa yang diutarakan dari pak Samuji selaku pendamping pemberdayaan. Berikut cuplikan wawancara beliau:

“Untuk pendorong kita punya sumber daya manusia yang dengan suka rela membantu warga tunagrahita, kita punya sekitar 10 orang pendamping dan 12 orang volunteer”.¹⁸

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa hal yang menjadi pendorong pemberdayaan warga tunagrahita di LKS Rumah Harapan Mulya adalah adanya sumber daya manusia yang dengan suka rela membantu warga tunagrahita. Selain adanya SDM tersebut, menurut

¹⁷ Eko Mulyadi, Wawancara, (Desa Karangpatihan Ponorogo Pada Tanggal 5 September 2023).

¹⁸ Samuji, Wawancara, (Desa Karangpatihan Ponorogo Pada Tanggal 23 Agustus 2023).

Ibu Yuliana hal yang mendukung pemberdayaan yakni keberhasilan teman-teman tunagrahita membuat suatu produk. Berikut cuplikan wawancara beliau:

“kalau faktor yang mendorong sih ketika kita melihat warga tunagrahita itu bisa menghasilkan income, meskipun itu gak banyak menurut kita, setidaknya ada kemajuan. Dengan seperti itu berarti mereka bisa seperti orang normal kan bisa menghasilkan uang sendiri. Hal itu yang membuat kita semangat untuk terus bergerak Bersama membantu mereka”.¹⁹

Dari hasil wawancara tersebut, dapat kita simpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mendukung terlaksananya kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga tunagrahita di LKS rumah Harapan Mulya yakni:

- a. *Pertama*, faktor utama yang mendukung yakni adanya Sumber Daya Manusia yang saling bahu-membahu membantu serta mendampingi proses produksi warga tunagrahita. SDM tersebut berasal dari pemerintah desa, masyarakat setempat, serta pemuda desa Karangpatihan yang tergerak hatinya untuk membantu memberdayakan tunagrahita.
- b. *Kedua*, selain SDM atau relawan-relawan, keberhasilan teman-teman tunagrahita menghasilkan income menjadi faktor pendukung kegiatan pemberdayaan. Sebab dengan mereka menghasilkan income berarti ada kemajuan, ada perubahan dalam hidupnya

¹⁹ Yuliana, Wawancara, (Desa Karangpatihan Ponorogo Pada Tanggal 23 Agustus 2023).

dimana dahulu mereka hanya mengandalkan bantuan dan sekarang sudah bisa menghasilkan pendapatan sendiri.

2. Faktor Penghambat

Dalam melaksanakan suatu program kegiatan tentu banyak sekali kendala atau faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Baik kendala itu datang dari faktor internal maupun eksternal. Demikian halnya dengan kegiatan pemberdayaan warga tunagrahita di Lembaga Kesejahteraan Sosial Rumah Harapan Mulya. Berikut penjelasan dari pak Eko selaku kepala desa Karangpatihan.

“Faktor penghambat itu komunikasi ya dulunya, dan anggaran itu pasti dulu, untuk sekarang ya pelan-pelan kami selesaikan seperti itu. anggaran sudah dari dana desa meskipun tidak banyak”.²⁰

Terkait faktor pendorong atau pendukung pemberdayaan, terdapat penjelasan dari Pak Samuji apa saja faktor yang menjadikan penghalang pemberdayaan tersebut. Berikut penjelasan beliau:

“Untuk penghambat itu komunikasi ya, karena kita berhadapan dengan tunagrahita untuk komunikasi 2 arah agak sulit, jadi kita butuh ekstra sabar untuk mendampingi mereka. Faktor lain nya pasar ya, jadi kita sebanyak apapun menghasilkan karya kalau pasarnya tidak menjangkau ya tidak berjalan”.²¹

Dari wawancara tersebut dapat kita simpulkan bahwa dalam kegiatan pemberdayaan tunagrahita di LKS Rumah Harapan Mulya tersebut yang menjadikan penghambat adalah komunikasi, sebab sasaran kegiatan tersebut adalah disabilitas intelektual sehingga sangat sulit untuk

²⁰ Eko Mulyadi, Wawancara, (Desa Karangpatihan Ponorogo Pada Tanggal 5 September 2023).

²¹ Samuji, Wawancara, (Desa Karangpatihan Ponorogo Pada Tanggal 23 Agustus 2023)

dilakukan komunikasi 2 arah, sehingga dibutuhkan kesabaran dalam mendampingi para tunagrahita.

Selain faktor komunikasi, terdapat beberapa hambatan dalam kegiatan pemberdayaan tunagrahita yang dipaparkan oleh Ibu Yuliana.

Berikut penjelasan beliau:

“Nah kalau untuk hambatan-hambatan itu ya banyak ya yang pasti. Pendanaan iya kan kan pastinya seperti itu butuh dana besar. terus juga dengan moodnya teman teman disabilitas itu juga itu juga kendala juga karena kadang ketika kita ajarin yuk di sini ngumpul kita begini ini nanti belum selesai tapi pengennya dia pulang ya udah pulang seperti itu”.²²

Dari pemaparan diatas dapat kita simpulkan bahwa, dalam kegiatan pemberdayaan keluarga tunagrahita terdapat beberapa hal yang menjadikan penghambat tercapainya kegiatan program pemberdayaan.

Hambatan-hambatan tersebut antara lain:

- a. Komunikasi, tidak dapat dipungkiri bahwa komunikasi menjadi faktor utama penyebab terhambatnya proses pemberdayaan. Karena yang dihadapi adalah warga tunagrahita sehingga sangat sulit untuk dilakukan komunikasi 2 arah. Sehingga diperlukan keterampilan tambahan bagi pendamping untuk bisa berkomunikasi dengan isyarat agar memudahkan para tunagrahita menerima informasi.
- b. Dana, sudah sangat pasti dalam kegiatan pemberdayaan memerlukan dana yang sangat besar. Tanpa didukung dengan

²² Yuliana, Wawancara, (Desa Karangpatihan Ponorogo Pada Tanggal 23 Agustus 2023)

dana yang cukup maka kegiatan pemberdayaan tidak akan terlaksana dengan maksimal.

- c. Semangat, faktor ini berkaitan dengan diri tunagrahita dimana dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan tidak mempunyai semangat, tidak memiliki kemauan belajar maka tidak terlaksana kegiatan pemberdayaan yang telah direncanakan.

3. Dampak Pemberdayaan

Kegiatan pemberdayaan bagi warga tunagrahita di Desa Karangpatihan dilakukan dengan cara memberikan pelatihan berupa keterampilan guna meningkatkan perekonomian tunagrahita. Sebelum adanya pemberdayaan Sebagian dari tunagrahita bekerja sebagai buruh tani, sebagian menganggur dan hanya berkeliaran dijalan tanpa menghasilkan pendapatan. Dengan diadakannya program pemberdayaan ini, diharapkan adanya peningkatan pendapatan ekonomi serta pergeseran mata pencaharian.

Pemberdayaan ekonomi di LKS Rumah Harapan Mulya dimulai sejak tahun 2013 hingga saat ini. Selama kurang lebih 10 tahun pemberdayaan, terdapat implikasi atau dampak ekonomi yang dirasakan warga tunagrahita di Desa Karangpatihan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak Eko sebagai berikut:

“Kalau dampak ya sangat jelas ya, bisa dikatakan kita sudah berhasil mengentaskan kemiskinan, bisa dilihat sekarang warga tunagrahita sudah punya penghasilan sendiri, punya keterampilan juga. Kalau dulu kan mereka untuk makan aja susah ya, kalau gak

dikasih ya gak makan. Tapi alhamdulillah sekarang mereka sudah bisa menghasilkan uang buat beli makan sendiri”.²³

Dari penggalan wawancara diatas dapat kita simpulkan bahwa pada saat ini, setelah hampir 10 tahun dilakukan pemberdayaan di desa Karangpatihan, sudah dapat kita rasakan dampak secara ekonomi. Warga tunagrahita yang awalnya hanya bekerja musiman sebagai buruh tani, dimana setelah habis masa panen mereka tidak lagi mempunyai penghasilan dan hanya menganggur, maka setelah adanya program pemberdayaan ini mereka masih bisa mendapatkan penghasilan dengan mengikuti kegiatan pemberdayaan yang sudah dilatihkan. Dengan ini warga tunagrahita bisa mendapat uang dengan tidak hanya bergantung pada profesi buruh tani, sehingga ketika selesai masa panen warga tunagrahita tidak menganggur.

Untuk mendapatkan penghasilan harian, warga tunagrahita bisa mendapatkannya dengan membuat kerajinan tangan keset dan tasbih. Untuk per item keset yang berhasil dikerjakan oleh warga tunagrahita, mereka mendapat upah sebesar Rp. 8.000. Sedangkan untuk tasbih yang berhasil diselesaikan, per item mereka mendapat upah Rp. 4.000. Untuk semua keperluan membuat keset dan juga tasbih sudah disiapkan oleh pendamping. Warga tunagrahita hanya perlu belajar membuat selanjutnya menyelesaikannya.

Produk yang telah dihasilkan oleh warga tunagrahita kemudian didistribusikan atau dipasarkan melalui wisata gunung beruk dan juga

²³ Eko Mulyadi, Wawancara, (Desa Karangpatihan Ponorogo Pada Tanggal 5 September 2023).

melalui even expo serta bakti sosial di desa Karangpatihan. Untuk hasil penjualan produk karya warga tunagrahita dimasukkan ke dalam kas LKS Rumah Harapan Mulya yang kemudian digunakan untuk perputaran modal selanjutnya. Besarnya pendapatan harian warga tunagrahita dapat dihitung berdasarkan berapa jumlah item yang berhasil mereka selesaikan.

Penghasilan dari budidaya ternak lele bisa mereka dapatkan setiap 3 bulan sekali yakni setiap masa panen tiba. Sebab budidaya ternak lele termasuk pemberdayaan yang sifatnya triwulan artinya hasilnya bisa dinikmati setiap 3 bulan sekali. Budidaya ikan lele ini untuk bibit ikan lele dan pakan lele pada wal pemberdayaan disiapkan oleh pemerintah desa selaku pemberdaya. Besarnya penghasilan dari hasil budidaya ternak ikan lele yang mereka dapatkan adalah kisaran Rp. 100.000 – Rp. 250.000 untuk setiap panen.²⁴

Dari budidaya ternak kambing, warga tunagrahita biasanya bisa mendapatkan penghasilan setahun sekali karena ini merupakan konsep pemberdayaan yang sifatnya tahunan. Warga tunagrahita bisa mendapatkan penghasilan dari ternak kambing ini setelah kambing yang dipelihara sudah berkembang biak, dengan demikian anak kambingnya dipelihara tunagrahita sedangkan untuk induknya bisa dijual untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Untuk kerajinan batik ciprat, karena ini merupakan produk baru dibandingkan dengan program pemberdayaan yang lainnya, serta system

²⁴ EM Chanel, Kick Andy Metro Tv Eko Mulyadi Pemberdaya Penyandang Tunagrahita, 20 Desember 2013, Dalam <https://www.youtube.com/watch?v=R2w2E8f5Aio>

produksinya masih *made by order*, sehingga pembagian hasilnya pun menyesuaikan banyaknya pesanan pada saat itu. Untuk pemasaran batik ciprat ini sudah mencapai kancah nasional, artinya sudah dijual ke beberapa wilayah kota di Indonesia. Meskipun pesanan tidak datang setiap hari, akan tetapi hal ini sudah merupakan suatu pencapaian yang bagus mengingat mereka berlatarbelakang disabilitas intelektual atau tunagrahita bisa menghasilkan sebuah karya yang sangat bagus.

D. Konsep Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Tunagrahita Dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals*

Sustainable Development Goals merupakan inisiatif global yang bertujuan menciptakan kehidupan manusia menjadi lebih baik dalam aspek sosial dan ekonomi serta dapat bersinergi dengan lingkungan. Konsep pembangunan berkelanjutan disusun berdasarkan beberapa dimensi diantaranya merupakan dimensi kelembagan, ekonomi, lingkungan dan juga dimensi sosial.²⁵ Didalam tujuanya penghapusan kemiskinan menjadi tujuan pertama SDGs. Dari tujuan tersebut juga dapat dilihat bahwa negara didunia sepakat bahwa kemiskinan harus dihapuskan.

Desa Karangpatihan merupakan salah satu desa dengan Sebagian penduduk warganya menyandang disabilitas intelektual atau tunagrahita. Sehingga untuk memutus mata rantai tunagrahita tersebut perlu adanya pemberdayaan untuk mengasah pola pikir serta keterampilan. Berdasarkan

²⁵ Ayu Oktaviani Musri, *Pelaksanaan Program Sustainable Development Goals Sdgs Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Mengurangi Kemiskinan*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020, 31.

penjelasan Pak Eko desa Karangpatihan ini menerapkan program SDGs secara maksimal dalam memberdayakan warga tunagrahita.

Dalam rangka mewujudkan konsep *Sustainable Development Goals* tersebut, dalam program pemberdayaan warga tunagrahita di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Rumah Harapan Mulya dilakukan pelatihan-pelatihan untuk dapat meningkatkan keterampilan sehingga dapat meningkatkan perekonomian warga tunagrahita. Berikut penuturan dari pak Eko selaku kepala desa Karangpatihan:

“Untuk mewujudkan SDGs itu kita bikin pelatihan pelatihan, jadi kita banyak bikin pelatihan seperti batik, ternak, ada juga keset, kemudian pelatihan membuat souvenir seperti centong, gantungan kunci dll untuk tunagrahita itu. Jadi fokus kita pada pelatihan-pelatihan. Lho orang mau selesai kemiskinan, kalau kita bisa mendidik sumber daya manusianya dulu, kita pintar kan orangnya baru kita selesaikan kemiskinan, kalau bodoh terus ya akan miskin terus”.²⁶

Dari hasil wawancara tersebut dapat kita pahami bahwa, dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi warga tunagrahita di desa Karangpatihan tepatnya di LKS Rumah Harapan Mulya fokus pada pelatihan-pelatihan. Artinya pemerintah desa menyakini bahwa dengan pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada warga tunagrahita seperti pembuatan kerajinan tangan tasbih, keset, gantungan kunci, batik ciprat, serta ternak lele dan kambing akan dapat merangsang pola pikir mereka sehingga pelan-pelan warga tunagrahita akan terlatih mempunyai keterampilan. Dengan demikian warga tunagrahita bisa mendapat penghasilan walaupun tidak

²⁶ Eko Mulyadi, Wawancara, (Desa Karangpatihan Ponorogo Pada Tanggal 5 September 2023).

besar. Hal demikian menggambarkan bahwa perlahan tingkat kemiskinan dapat teratasi dengan adanya kegiatan pelatihan pada pemberdayaan.

Penjelasan tersebut diatas dikuatkan oleh penuturan ibu Yuliana selaku ketua di LKS Rumah Harapan Mulya, berikut cuplikan wawancara:

“Ya dengan pelatihan-pelatihan tersebut, karena dengan berbagai pelatihan kita sudah berhasil mengatasi masalah kemiskinan. Sekarang teman-teman tunagrahita sudah tidak kelaparan lagi ya, Kalau untuk makanan pokok, saya rasa sekarang itu sudah mereka sudah tidak kekurangan ya kan? Dengan peran pemerintah juga itu untuk makanan pokok, insya allah enggak kekurangan terus. Kalau untuk peningkatan tentang sumber dayanya itu, mereka juga yang bisa kita berdayakan. Mereka juga meningkat dari sebelumnya belum bisa apa apa sekarang sudah bisa berpenghasilan. Kalau dulu mereka Cuma nungguin bantuan kan? Kalau sekarang kan mereka setidaknya mau lah berusaha. Jadi itu sudah merubah pola pikir dan juga termasuk salah satu perkembangan”.²⁷

Dari hasil wawancara tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam rangka mewujudkan *Sustainable Development Goals (SDGs)* dalam program pemberdayaan di LKS Harapan Mulya dilakukan dengan berbagai pelatihan. Sebab dengan pelatihan-pelatihan tersebut sudah berhasil mengatasi kemiskinan. Terbukti saat ini teman-teman tunagrahita sudah mempunyai penghasilan sendiri dan mereka sudah tidak kelaparan. Sedangkan untuk peningkatan sumber daya, warga tunagrahita saat ini sudah mulai berdaya, hal ini dapat kita lihat bahwasanya saat ini warga tunagrahita sudah mempunyai penghasilan sendiri. Kondisi demikian sudah merubah pola pikir warga tunagrahita dan ini termasuk perkembangan. Hal ini jauh berbeda dengan dahulu dimana para warga

²⁷ Yuliana, Wawancara, (Desa Karangpatihan Ponorogo Pada Tanggal 23 Agustus 2023)

tunagrahita hanya pengangguran dan berkeliaran di jalan-jalan tanpa ada penghasilan.

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh keterangan pak Samuji selaku pendamping pemberdayaan Di LKS Harapan Mulya, berikut penjelasan beliau:

“Kalau usaha kami sebagai pemerintah desa karangpatihan atau yang berkecimpung di rumah haran ini ya mengupayakan mereka itu dapat bantuan dapat apa keterampilan termasuk membantu mereka dalam hal keterampilan. Yang endingnya nanti dengan harapan mereka itu bisa punya penghasilan. Kalau dulu sebelum ada kegiatan ini, mereka itu hanya bantu tetangganya ketika panen seperti itu”.²⁸

Dari beberapa penjelasan diatas, dapat kita tarik benang merah bahwa konsep pemberdayaan ekonomi keluarga tunagrahita dalam meningkatkan *Sustainable Development Goals (SDGs)* adalah berupa pelatihan-pelatihan. Sebab untuk dapat mengentaskan kemiskinan maka langkah awal harus dididik dahulu sumber daya manusianya. Setelah sumber daya manusianya pintar maka langkah selanjutnya adalah menghapuskan kemiskinan.

²⁸ Samuji, Wawancara, (Desa Karangpatihan Ponorogo Pada Tanggal 23 Agustus 2023)

BAB IV

ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA TUNAGRAHITA DALAM KONSEP SDGS DI DESA KARANGPATIHAN KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis Pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Tunagrahita Di Desa Karangpatihan

Manusia sebagai makhluk sosial dianjurkan untuk saling memiliki kepedulian serta sikap tolong menolong terhadap sesama. Dengan adanya sikap saling tolong menolong akan membantu keberlangsungan ekonomi masyarakat lemah, terkhusus mereka yang memiliki keterbelakangan tidak akan bisa mandiri tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Namun, dengan adanya kondisi keterbelakangan tadi bukan berarti mereka penyandang tunagrahita tidak memiliki kemampuan sehingga dapat memberi manfaat bagi dirinya sendiri atau orang lain. Terkadang, justru mereka mempunyai kemampuan yang lebih dibandingkan dengan manusia normal lainnya. Agar para penyandang keterbelakangan mental ini mampu mandiri serta tidak menggantungkan keberlangsungan hidupnya pada orang lain tentu diharapkan adanya perilaku kepedulian dari masyarakat. Bentuk kepedulian ini dapat diwujudkan dengan pemberdayaan.

Program pemberdayaan Masyarakat di desa Karangpatihan dilakukan pertama kali pada tahun 2010 dan mulai dikembangkan pada tahun 2013, hingga saat ini lembaga yang menaungi pemberdayaan di desa Karangpatihan sudah mendapat izin resmi dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi

Manusia(Kemenkumham). Berdasarkan data penduduk desa Karangpatihan tahun 2022 dari 5.845 jiwa. Terdapat 96 warganya sebagai penyandang disabilitas intelektual atau tunagrahita. Kegiatan pemberdayaan ini ditujukan kepada warga tunagrahita ringan dan sedang. Untuk tunagrahita berat sudah tidak bisa diberdayakan, sebab untuk memenuhi kebutuhan dasar saja mereka harus bergantung kepada orang lain. Meski demikian, pemerintah desa membuat kebijakan dengan memberikan *supplay* sembako berupa beras setiap bulan untuk membantu keluarganya.

Berdasarkan hasil penelitian, dibentuknya Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Rumah Harapan Mulya adalah dengan tujuan untuk mendidik, membina, serta melatih warga tunagrahita yang lemah sehingga mereka dapat mempunyai keterampilan untuk menggerakkan aktivitas ekonomi keluarga tunagrahita dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari sehingga mereka tidak hanya bergantung pada bantuan konsumtif. Hal tersebut sesuai dengan salah satu tujuan dari pemberdayaan yang diungkapkan oleh Person dan Edi Suharto, bahwa pemberdayaan menekankan orang untuk memperoleh keterampilan, pengetahuan, serta kekuasaan yang relatif untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.¹ Adapun warga tunagrahita yang diberdayakan di LKS rumah Harapan Mulya ini adalah

¹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Soaial*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), 58-59.

tunagrahita dengan kategori ringan dan sedang. Sebagaimana dijelaskan dalam teori Salimah berikut ini:²

Tabel 4.1 Kemampuan Tunagrahita berdasarkan tingkat IQ

| No | Tingkat | Kisaran IQ | Kemampuan |
|----|--------------|----------------|--|
| 1. | Ringan | 52-68 | Mampu mengikuti kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk keberlangsungan hidupnya. Karena menurut keterangan biasanya mereka dapat mencapai kemampuan kerja dan bersosialisasi yang cukup. |
| 2. | Moderat | 36-51 | Mereka dapat mengikuti kegiatan pemberdayaan dan dapat memperbaiki kondisi ekonomi keluarga mereka. Sebab mereka dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dengan melakukan pekerjaan yang tidak terlatih atau semi terlatih di bawah pengawasan, juga memerlukan pengawasan dan juga bimbingan ketika mengalami stress sosial maupun ekonomi yang ringan. |
| 3. | Berat | 20-35 | Terkadang bisa dan terkadang juga tidak bisa mengikuti kegiatan pemberdayaan. |
| 4. | Sangat berat | 19 atau kurang | Tidak bisa mengikuti pemberdayaan |

Dari data tersebut, warga tunagrahita yang diberdayakan adalah tunagrahita kategori ringan sebagaimana dijelaskan bahwa warga tunagrahita dalam kategori ringan dan sedang masih bisa melakukan aktifitas serta dapat berinteraksi sebagaimana manusia normal lainnya, akan tetapi membutuhkan dukungan yang kuat. Sedangkan tunagrahita dalam kategori berat tidak bisa diberdayakan. Praktik pemberdayaan bidang ekonomi bagi penyandang tunagrahita ini memiliki kemiripan dimensi pendekatan Mardi Yatmo Hutomo sebagai berikut:

²Siti Salmiah, *Reterdasi Mental*, (Medan: Departemen Ilmu Kedokteran Gigi Anak Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera utara: 2010), 4-5.

1. Penguatan Modal

Tabel 4.2 Modal Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Rumah Harapan Mulya³

| Jenis Modal | Keterangan |
|--------------------------------------|--|
| Dana CSR | Coorporate Sosial Responsibility (CSR) yakni dana yang dikeluarkan oleh perusahaan besar kemudian diberikan kepada pihak yang dapat mengembangkan hasil dana tersebut untuk pengembangan berkelanjutan. Warga tunagrahita menerima dana CSR dari Bank Indonesia, dan selanjutnya dibentuklah kegiatan usaha. |
| Donatur-donatur | Selain CSR, dalam pengembangan kegiatan usaha warga tunagrahita mendapat dana dari donatur-donatur yang berasal dari dinas sosial, perusahaan dan lain sebagainya. |
| Kas hasil penjualan kerajinan tangan | Hasil dari penjualan kerajinan tangan keset, tasbih dan juga batik ciprat, kemudian 50% diberikan kepada pembuat dan 50% dimasukkan kedalam kas yang selanjutnya digunakan sebagai perputaran modal usaha. |
| Swadaya masyarakat | Dengan adanya partisipasi warga sekitar berupa kemampuan yang dimiliki warga baik berupa materi maupun fisik, warga turut andil dalam menggerakkan pemberdayaan untuk warga tunagrahita. Ada swadaya yang memberikan sumbangan berupa tanah, wakaf materill, dan juga sumbangan tenaga sebagai bentuk swadaya dari masyarakat sekitar. |

Dari keterangan diatas, dijelaskan bahwa pada penguatan modal pemberdayaan masyarakat tunagrahita menggunakan dana Coorporate Sosial Responsibility (CSR), donatur tidak tetap, kas hasil penjualan kerajinan tangan serta adanya swadaya masyarakat setempat. Modal yang dipergunakan pada

³ Data hasil wawancara dengan pihak pemberdaya di LKS Rumah Harapan Mulya yang diolah peneliti

pengembangan kegiatan ekonomi warga tunagrahita melalui pemberdayaan ini banyak menggunakan dana sosial. Hal ini sesuai dengan teori ekonomi rakyat yg dipaparkan oleh Mubyarto bahwa ekonomi rakyat dapat dilakukan oleh rakyat tanpa modal besar dan dengan cara-cara swadaya. Selain itu, ekonomi rakyat dibangun sesuai kekuatan sendiri, yang mana setiap usaha yang dilakukan bertujuan untuk kebaikan sendiri serta keluarga.⁴

Permodalan merupakan salah satu faktor yang menimbulkan permasalahan dalam suatu usaha niaga, jika terdapat modal yang cukup kuat maka kegiatan usaha niaga dalam menggerakkan perekonomian masyarakat dapat berjalan dengan baik. Permasalahan permodalan pada sebagian kecil warga tunagrahita di Desa Karangpatihan antara lain mengenai pinjaman keuangan melalui rentenir. Kegiatan tersebut sebenarnya sangat memberatkan mereka karena ada yang menggunakan agunan yang termasuk golongan berat, namun mereka tidak memahaminya.

Mengutip teori Mardi Yatmo Hutomo, permasalahan permodalan bisa diatasi sebagaimana beliau menjelaskan bahwa salah satu aspek permasalahan para tunadaya adalah permodalan. Maka beliau memberikan gambaran tentang cara memperkuat modal usaha yang efektif dan efisien, yaitu dengan memberikan pinjaman kepada mereka di lembaga keuangan, hal ini dapat mendidik mereka untuk bertanggung jawab dalam mengembalikan kredit..⁵

Sedangkan dalam Islam sendiri dijelaskan bahwa transaksi dengan lembaga keuangan adalah untuk menghindari riba atau pemberatan beban

⁴ Mubyarto, *Ekonomi Rakyat Dan Program IDT, ...*⁴

⁵ Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik Dan Implementasi,*

pengembalian. Sadr menjelaskan, riba merupakan sesuatu yang sebaiknya dihindarkan dari interaksi ekonomi masyarakat. Sedangkan zakat merupakan instrument strategis yang dapat membantu mewujudkan kesejahteraan di tengah kehidupan masyarakat.⁶

Seperti yang dijelaskan Umar Capra bahwa zakat harus menjadi pelengkap keuntungan permanen yang terbaik bagi manusia yang tidak mampu menghasilkan keuntungan yang cukup melalui usahanya sendiri, atau untuk tujuan lain, zakat dapat digunakan untuk memberikan pelatihan dan modal sehingga dapat mendirikan usaha kecil-kecilan. dan pada akhirnya mereka mampu berusaha secara mandiri.⁷

2. Pelatihan Usaha

Tabel 4.3 Pelatihan Kegiatan Usaha Warga Tunagrahita

| Kategori | Kegiatan | Pelatihan |
|-----------|--------------------|--|
| Pernakan | Budidaya ikan lele | Diberikan kepada warga tunagrahita dalam kategori ringan dan sedang. Warga telah dilatih dengan dipraktikkan menggunakan bahasa isyarat di hadapan mereka, mulai dari teknik memberi makan, mengeringkan kolam, dan memanen. |
| | Budidaya kambing | Pernakan kambing dilakukan melalui penyuluhan dengan konsep berkelompok. setiap kelompok yang terdiri dari 10 orang akan diberikan 15 ekor kambing. setiap orang pasti mendapat 1 ekor kambing, pada saat yang sama 5 ekor kambing tersebut digilir antar masing-masing orang sampai kambing tersebut beranak. |
| Kerajinan | Kerajinan tangan | Kerajinan tasbih terbuat dari manik- |

⁶ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 325

⁷ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN-Maliki PRESS, 2010), 48.

| | | |
|--------|------------------------|---|
| tangan | tasbih | manik yang dirangkai menggunakan benang bening. Warga dilatih merangkai, mengingat dan menghitung hingga 33. |
| | Kerajinan tangan keset | Kerajinan keset dibuat dari bahan kain perca, kemudian dirangkai hingga menjadi keset. Ketika warga tunagrahita mampu melakukan pekerjaannya sendiri, maka mereka dapat mengerjakan di rumah. |
| | Kerajinan batik ciprat | Kerajinan batik ciprat diajarkan kepada warga tunagrahita, dimulai dengan instruksi memanaskan cat, memercikkan batik dengan menggunakan kuas, kemudian mengaplikasikan watergloss, mencuci dan mengeringkan. |

Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan usaha bagi warga tunagrahita diarahkan pada 2 kategori yaitu peternakan dan kerajinan tangan. Ada beberapa usaha yang tidak berjalan lancar atau bahkan sedikit berproduksi, termasuk kerajinan tasbih, karena pangsa pasarnya yang sulit. Tabel di atas menjelaskan bahwa pelatihan yang diberikan oleh LKS Rumah Harapan Mulya berupa praktik sederhana, penyuluhan melalui prinsip organisasi, dan penggunaan bahasa isyarat. Peneliti melihat bahwa metode pelatihan seperti ini cocok untuk orang yang mengalami keterbelakangan mental, karena sebenarnya manusia yang mengalami keterbelakangan mental juga melakukan interaksi seperti orang normal lainnya, padahal yang membedakan adalah IQ manusia yang mengalami keterbelakangan mental sedikit berbeda dengan masyarakat normal.

Sementara itu, mengacu pada teori Musa, disebutkan bahwa pelatihan usaha yang dapat diberikan kepada peserta berupa pemahaman konsep dan segala macam permasalahan yang ada dapat menumbuhkan wawasan lebih

menyeluruh dan motivasi terhadap peserta serta dapat mempunyai pengetahuan teoritis. Dengan adanya kiat-kiat tertentu maka dapat menghindari sekecil mungkin adanya kegagalan dalam mengembangkan usaha.⁸

3. Pendampingan

Beberapa kegiatan pendampingan yang dilakukan di LKS Rumah Harapan Mulya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4 Pendampingan kegiatan usaha warga tunagrahita

| Jenis pendampingan | Keterangan |
|--|---|
| Tenaga pendamping dari masyarakat setempat serta Volunteer | Pendampingan dari pihak pengelola diberikan dengan mengarahkan mereka hingga warga tunagrahita yang dilatih mampu melakukannya sendiri. Pendampingan dengan cara sederhana, prakting langsung dengan menggunakan bahasa isyarat. Pendamping atau volunteer tidak mendapatkan gaji, mereka mendampingi dengan suka rela, membantu semaksimal mungkin. Pendamping selalu siap untuk memberikan informasi serta arahan kepada warga tunagrahita yang diberdayakan. |
| Mendatangkan pihak luar (Pendamping profesional) | Pendamping profesional didatangkan untuk memberikan arahan pada program tertentu yang sifatnya sementara. Dalam hal ini LKS rumah harapan mulya mendatangkan orang kementerian sosial dari temanggung yang memberikan pembinaan pelatihan kerajinan tangan kepada pengurus, setelah pengurus menguasai kemudian pengurus mengajarkan kepada warga tunagrahita. |

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat dijelaskan bahwa pendampingan yang diberikan melalui LKS Rumah Harapan Mulya sebagai pemberdayaan warga tunagrahita secara ekonomi adalah dengan cara memberikan pendampingan kepada pengurus sendiri dan masyarakat sekitar,

⁸ Musa Asy'arie, *Etos Kerja Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: Lesfi, 1997), 141.

serta dengan cara mendatangkan pihak yang professional untuk memberikan pendidikan dan pembinaan.⁹ Pendampingan yang dilakukan di LKS Rumah Harapan Mulya tidak mengeluarkan biaya besar, sebab pendamping tersebut melakukannya dengan suka rela dan tanpa mengharapkan upah dalam proses pendampingan dan pelatihan kepada warga tunagrahita.

Gambar 4.1 Data Anggota Pendamping LKS Rumah Harapan Mulya



Sumber: Dkumen LKS Rumah Harapan Mulya Karangpatihan

Gambar 4.2 Data Anggota Volunteer LKS Rumah Harapan Mulya



Sumber: Dokumen LKS Rumah Harapan Mulya Karangpatihan

Bantuan pendampingan ini sesuai dengan teori Edi Suharto¹⁰ yang menyatakan bahwa memiliki pendamping ahli yang mampu mengarahkan dan membimbing suatu kegiatan usaha hingga mampu dan berhasil menguasai merupakan salah satu faktor yang mendorong keberhasilan suatu pemberdayaan masyarakat. Hal ini kemudian diperkuat melalui teori Mahdi yang menyatakan bahwa memiliki pendamping *eksitu* hanya akan menyebabkan biaya transaksi dengan bantuan modal yang mungkin mahal jika

⁹ Musa Asy'arie, *Etos Kerja Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, ... 142.

¹⁰ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, ..., 93

menggunakan upah sehingga untuk lebih efisien adalah menggunakan pendamping *insitu*.¹¹

Peneliti melihat bahwa pendampingan sebagai sebagai salah satu bentuk kegiatan pemberdayaan ekonomi warga tunagrahita tentunya perlu ditingkatkan sebab dengan pendampingan yang lebih kuat maka akan lebih mudah bagi warga tunagrahita dalam menjalankan proses kegiatan usaha yang telah dilatih kepada mereka.

4. Pemasaran

Ketika hasil usaha produksi sudah di dikumpulkan, maka LKS rumah harapan mulya mendistribusikan hasil kerajinan warga tunagrahita dengan cara sebagai berikut:

Tabel 4.5 Pemasaran Hasil Usaha Warga Tunagrahita

| Jenis Pemasaran | Proses |
|----------------------|---|
| Even Expo/ Pameran | Apabila ada pameran atau expo yang diselenggarakan oleh pemerintah atau acara-acara menarik, maka hasil kerajinan berupa tasbih, keset, batik siram, dan lain-lain dapat dikirimkan ke sana. |
| Jaringan dinas-dinas | Dengan jaringan yang dimiliki masyarakat setempat seperti dari bapak kepala desa yang mempunyai jaringan pangsa pasar dengan kelompok pemerintah sehingga hasil kerajinan ditawarkan kepada mereka. |
| Media social | Hasil kerajinan warga tunagrahita dipasarkan melalui media sosial seperti website, instagram, dan lain sebagainya. |
| Wisata gunung beruk | Desa karangpatihan mempunyai kekayaan alam yang menarik yaitu Gunung Beruk yang dikelola oleh warga Karangpatihan. . Melalui kerja sama jaringan Karangtaruna, sejumlah produk kerajinan tersebut dipasarkan pada pengunjung wisata gunung beruk. |

¹¹ Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teori Dan Implementasi,....*

Berkaitan dengan sarana pemasaran merupakan suatu hal yang dapat digunakan sebagai penunjang kegiatan usaha. Hasil usaha berupa kerajinan tangan warga tunagrahita dipasarkan oleh pengelola dan juga masyarakat yang bersedia menjadi sukarelawan. Hasil tersebut dipasarkan dengan berbagai cara antara lain melalui even expo atau pameran, jaringan ke dinas-dinas, media sosial, dan kerjasama dengan karangtaruna Desa Karangpatihan dalam pemasaran di kawasan wisata gunung beruk.

Pemasaran hasil kerajinan dilakukan secara bersama-sama oleh LKS rumah harapan Mulya, untuk hasil dari peternakan baik budidaya lele dan juga kambing dijual langsung ke pasar dan juga supplier ikan lele dan kambing. Hal ini sesuai dengan teori Mardi yang menyatakan bahwa penguatan infrastruktur pemasaran seperti transportasi atau lainnya diperlukan guna meningkatkan penerimaan pengusaha mikro dan dapat menunjang kegiatan usaha.¹²

Selain itu, Desa Karangpatihana juga menyelenggarakan kegiatan pengelolaan wisata melalui kerjasama karangataruna sehingga dapat memperluas potensi ekonomi desa Karangpatihan. Sebagaimana hasil penelitian oleh Ika Farida Ulfa dan Alip Sugianto¹³ bahwa kemampuan wisata Gunung Beruk yang dilestarikan dan dikelola sebagai daya tarik pengunjung dapat berimplikasi pada peningkatan perekonomian masyarakat tunagrahita di Desa Karangpatihan, sehingga kemiskinan dapat berkurang.

¹² Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teori Dan Implementasi*,....

¹³ Ika Faridaa Ulfah dan Alip Sugianto, *Revolusi Mentalkampung Idiot Menuju Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal: Sebuah Strategi Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Karangpatihan Balong Ponorogo*, (Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo).

B. Analisis Dampak Pemberdayaan Terhadap Ekonomi Keluarga Tunagrahita

Pemberdayaan bidang ekonomi bagi keluarga tunagrahita dibentuk dengan memberikan keterampilan sehingga dapat menekan sistem perekonomian warga tunagrahita. Kesuksesan kegiatan usaha tersebut berpusat pada lembaga yang bernama LKS Rumah Harapan Mulya. Semua kegiatan dilakukan sesuai dengan kreativitas masyarakat desa Karangpatihan. Adapun mengenai peningkatan kesejahteraan keluarga tunagrahita pasca pemberdayaan berdampak pada beberapa hal yakni dampak tersebut dapat dilihat pada keterangan dibawah ini:

Tabel 4.6 Hasil Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Tunagrahita

| Kategori | Hasil | Keterangan |
|------------------|--|--|
| Mata pencaharian | Memiliki kegiatan yang dapat menghasilkan income | <ol style="list-style-type: none"> Kegiatan pada bidang peternakan Hal ini dilakukan pada budidaya ikan lele, dan juga ternak kambing Kegiatan pada bidang kerajinan tangan Kerajinan tangan yang dihasilkan berupa tasbih, kerajinan tangan keset, serta batik ciprat |
| | Pendapatan | <p>Untuk pendapatan terdapat tiga konsep</p> <ol style="list-style-type: none"> Harian: warga tunagrahita bisa mendapatkan pendapatan harian dari kerajinan tangan yang mereka kerjakan. Untuk kerajinan keset @ Rp.8.000, tasbih @ Rp. 3.000 Triwulan: pendapatan ini dihasilkan dari kegiatan budidaya ternak lele. Dalam sekali panen yakni 3 bulan sekali warga tunagrahita bisa mendapatkan uang kisaran Rp.150.000 – Rp. 300.000. Tahunan: pendapatan tahunan ini dihasilkan dari keberhasilan ternak kambing bagi warga yang mengikuti kegiatan pemberdayaan |

| | | |
|---------------------------|------------------------------------|---|
| | Memenuhi kebutuhan | Kebutuhan yang dapat dipenuhi adalah kebutuhan sehari-hari yang sederhana seperti beras, gula, minyak, bumbu masak dan lauk pauk. Sedangkan untuk kebutuhan sekunder, warga ada yang mampu dan ada pula yang tidak mampu. Dan untuk memenuhi hal tersebut mereka menggunakan bantuan dari keluarga maupun saudaranya |
| Kondisi sosial masyarakat | Dipenuhinya kebutuhan gizi. | Gangguan keterbelakangan mental akibat gizi buruk bisa terus hilang seiring dengan manfaat pemberdayaan. dengan cara ini, selangkah demi selangkah, akan berdampak pada hilangnya orang-orang yang mengalami keterbelakangan mental. Hal ini terlihat dari anak-anak yang lahir dari orang-orang dengan keterbelakangan mental yang sehat dan mampu bersekolah dengan baik. |
| | Kemampuan mobilitas | Warga tunagrahita dapat pergi ke toko, pasar, musala dan mengunjungi tempat-tempat penting yang mereka anggap penting |
| | Partisipasi dalam kehidupan social | Warga tunagrahita dapat ikut serta dalam gotong royong, kegiatan agustusan. Serta dapat mengikti kegiatan keagamaan seperti tahlilan dan lainnya. |

Dari hasil tabel diatas, dapat dianalisis berdasarkan teori yang disebutkan sebelumnya. Dampak pemberdayaan yang dimaksud disini adalah mengacu pada indikator pencapaian pemberdayaan ekonomi menurut Edi Suharto sebagai berikut:

a. Memiliki sumber pendapatan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan dilihat dari teori keberhasilan pemberdayaan yang dijelaskan oleh Edi Suharto¹⁴, disini warga tunagrahita bisa memiliki pendapatan sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya

¹⁴ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial)*, 65

sendiri dan keluarganya. Dengan adanya pemberdayaan, warga tunagrahita juga bisa mempunyai kegiatan yang dapat menghasilkan pendapatan. Sebagaimana dijelaskan oleh Rizal bahwa salah satu indikator keberhasilan perekonomian umat manusia yang mengacu pada indeks pembangunan manusia adalah memiliki pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup.¹⁵ Sehingga pekerjaan dari kegiatan usaha dalam skala mikro jika dapat memenuhi kebutuhan hidup dapat meningkatkan kesejahteraan umat manusia.

Dengan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat tunagrahita sebagaimana disebutkan diatas, maka setelah dilaksanakan kegiatan pemberdayaan maka masyarakat tunagrahita dapat dikatakan berdaya. Sebagaimana salah satu indikator keberdayaan yang dikemukakan oleh Edi Suharto¹⁶ bahwa salah satu indikator keberdayaan adalah adanya potensi pemenuhan komoditas kecil dan potensi belanja komoditas besar.

b. Memiliki mobilitas yang luas

Dari hasil penelitian diatas dapat memberikan penjelasan bahwa warga penyandang tunagrahita mampu untuk pergi ke tempat-tempat yang dianggap penting, antara lain pergi ke toko, pasar, mushola, dan pergi ke puskesmas. Hal ini menunjukkan bahwa setelah mempunyai pendapatan dari kegiatan pemberdayaan, warga tunagrahita mempunyai mobilitas yang luas walaupun terkadang masih membutuhkan bantuan dari orang lain.

¹⁵ Soeharto Prawirokusumo, *Ekonomi Kerakyatan: Konsep, Kebijakan Dan Strategi*, (Yogyakarta: BPF, 2001), 44.

¹⁶ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial)*, 65.

Faktor keberhasilan ini juga sesuai dengan salah satu teori indikator pemberdayaan yang dikemukakan Edi Suharto bahwa salah satu indikator pemberdayaan adalah memiliki kemampuan mobilitas. Mobilitas yang dimaksud disini adalah kesanggupan seseorang untuk keluar dari tempat tinggal atau tempat lain dari tempat tinggalnya seperti pasar, mushola, fasilitas medis dan lain sebagainya.¹⁷

c. Mampu Berpartisipasi Dalam Kehidupan Sosial

Kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan sosial menjadi faktor keberhasilan kegiatan pemberdayaan. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa partisipasi warga tunagrahita ini cukup bagus seperti halnya mereka bisa berpartisipasi dalam kegiatan sosial gotong royong, agustusan, serta partisipasi dalam kegiatan keagamaan seperti tahlilan dan lain sebagainya.

Dengan adanya pemberdayaan, perekonomian keluarga tunagrahita kini tidak lagi bergantung pada bantuan konsumtif masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan kemampuan mereka dapat bekerja mandiri baik dari hasil peternakan maupun dari hasil kerajinan tangan, sehingga mereka memperoleh pendapatan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Meskipun dari masyarakat masih ada bantuan konsumtif namun warga tunagrahita tidak lagi bergantung pada bantuan tersebut.

Meski mempunyai keterbatasan dalam hal kemampuan berfikir (akal), namun warga tunagrahita tetap mampu melakukan kegiatan perekonomian. Hasil tersebut menguatkan teori yang dijelaskan oleh Edi Suharto yang

¹⁷ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial)*, 68.

menjelaskan bahwa pemberdayaan dilakukan untuk menjadikan masyarakat yang mandiri, bebas dari ketergantungan, mampu menciptakan inovasi baru, serta mampu meningkatkan perekonomian ke arah yang lebih baik.¹⁸

C. Analisis Efektivitas Program Pemberdayaan Ekonomi Dalam Konsep Sustainable Development Goals

Efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu organisasi atau program. Efektivitas disebut juga efektif apabila tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya telah tercapai. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi. Efektivitas dalam penelitian ini berarti tercapainya tujuan dari program pemberdayaan ekonomi keluarga tunagrahita di desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dengan melihat *output* yang dihasilkan melalui kegiatan pelatihan-pelatihan dalam pemberdayaan masyarakat tunagrahita.

Untuk mengukur efektifitas program pemberdayaan ekonomi keluarga tunagrahita di desa Karangpatihan, penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Richard M. Steers¹⁹, yaitu tingkat efektivitas dapat diukur melalui 3 indikator yaitu: pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.

1. Pencapaian tujuan, pendekatan ini merupakan keseluruhan dari upaya maupun tujuan yang sesuai dengan rencana yang diharapkan. Tujuan pencapaian ini harus mampu memberikan manfaat individu maupun

¹⁸ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial)*,... 65.

¹⁹ M. Richard Steers, Terj: Magdalena Jamin, *Efektivitas Organisasi*, (Jakarta: Erlanga, 1980), 5.

organisasi atau lembaga. Pencapaian tujuan terdiri dari 2 sub indikator yaitu: kurun waktu dan sasaran yang merupakan target.²⁰

Dari segi waktu, kegiatan pemberdayaan di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Rumah Harapan Mulya ini sudah berjalan sejak tahun 2013. Artinya sudah hampir 10 tahun pemberdayaan ini dilakukan dan berhasil menjadikan keluarga tunagrahita berdaya dengan berbagai kegiatan usaha. Kegiatan yang telah dilakukan antara lain: Pertama, kerajinan tangan yang terdiri dari membuat keset, tasbih, gantungan kunci, souvenir (centong dan sutil), serta batik ciprat. Kedua, kegiatan peternakan yang terdiri dari budidaya ikan lele dan ternak kambing. Selama ini kegiatan pemberdayaan warga tunagrahita tidak berjalan secara konsisten atau berlangsung terus-menerus, akan tetapi kegiatan berjalan sesuai dengan ketersediaan bahan yang digunakan untuk usaha, sebagaimana dijelaskan oleh pak Samuji²¹ bahwa apapun yang bisa dilakukan oleh warga tunagrahita dan itu dapat memberi keuntungan bagi mereka maka akan di berikan pelatihan.

Sedangkan dari sasaran atau target, kegiatan pemberdayaan ini berfokus pada tunagrahita dengan kategori tunagrahita sedang dan ringan. Dalam hal ini warga tunagrahita dilatih serta didampingi dalam proses kegiatan usaha dalam pemberdayaan. Sedangkan untuk tunagrahita dengan kategori berat tidak bisa mengikuti kegiatan pemberdayaan dikarenakan kondisinya yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan usaha.

²⁰ Ayu Lestari, Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Buntuna Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, *Tolis Ilmiah: Jurnal Penelitian* Vol. 3, No. 1, Juni 2021.

²¹ Samuji, Wawancara, (Desa Karangpatihan Ponorogo Pada Tanggal 23 Agustus 2023).

Akan tetapi meskipun tidak mengikuti kegiatan pemberdayaan, pemerintah tetap mensuplay bantuan sembako setiap bulannya. Dari segi kurun waktu dan sasaran target dalam kegiatan pemberdayaan ini dapat dikatakan efektif melihat tingkat keberhasilan tunagrahita yang saat ini mempunyai keterampilan sehingga menghasilkan pendapatan sendiri.

2. Integrasi, yaitu merupakan pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi atau komunikasi dan pengembangan konsesnsus. Integrasi menyangkut proses sosialisasi dan partisipasi masyarakat.²²

Proses sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Lembaga kesejahteraan social (LKS) rumah harapan mulya cukup baik. Hal ini terlihat salah satunya dari proses sosialisasi kegiatan usaha, dalam hal ini para pengurus lembaga LKS, pendamping serta volunteer yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan selalu melakukan koordinasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan serta rutin mengadakan rapat evaluasi setiap 3 bulan sekali untuk melihat perkembangan program yang dilaksanakan. Selain sosialisasi, pihak LKS rumah harapan mulya juga bekerja sama dengan beberapa pihak guna terwujudnya para tunagrahita yang mandiri, seperti halnya bekerjasama dengan dinas sosial Temanggung yang merupakan tenaga ahli dalam pembuatan batik.

²² M. Richard Steers, Terj: Magdalena Jamin, *Efektivitas Organisasi*, (Jakarta: Erlanga, 1980), 5.

3. Adaptasi, merupakan bagaimana proses dalam penyesuaian diri yang dilaksanakan untuk menyelaraskan individu dengan segala sesuatu yang berubah di lingkungan sekitarnya.²³ Untuk hal ini, berkaitan dengan keteraturan implementasi atau program yang akan dilaksanakan dan harus menyesuaikan dengan keadaan lapangan, oleh sebab itu ada beberapa kriteria proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.²⁴

Untuk proses penyesuaian diri masyarakat serta warga tunagrahita di desa Karangpatihan dengan kegiatan-kegiatan dalam pemberdayaan yang diadakan LKS rumah harapan dapat dikatakan cukup baik karena masyarakat mampu menyesuaikan diri dengan kegiatan-kegiatan usaha yang ada. Mereka mengikuti kegiatan-kegiatan usaha tersebut yang biasanya dilaksanakan di LKS Rumah Harapan Mulya maupun di rumah-rumah warga tunagrahita sebagai sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan pemberdayaan warga tunagrahita. Akan tetapi, sarana dan prasarana yang ada ternyata masih belum lengkap. Masih ada yang diperlukan dalam pemberdayaan ini seperti lemari atau etalase untuk menyimpan hasil karya tunagrahita yang siap untuk dipasarkan. Oleh sebab itu para pelaksana serta pendamping perlu berkoordinasi dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kelengkapan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pemberdayaan.

²³ Tesalonika Syela Malake, Dkk., Efektifitas Program Kampung Keluarga Berencana (KB) Di Desa Temboan Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan, Jap: Jurnal Administrasi Public, No.2 Vol. VII (2022), 112.

²⁴ M. Richard Steers, Terj: Magdalena Jamin, *Efektivitas Organisasi*, ... 5.

Untuk proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja di LKS Rumah Harapan Mulya ini awalnya diadakan melalui proses rekrutmen, dalam hal ini pemerintah desa mencari masyarakat yang mempunyai jiwa sosial tinggi akan di rekrut untuk dijadikan pendamping pemberdayaan. Seiring berjalannya waktu, mulai tahun 2019 LKS Rumah Harapan mempunyai volunteer yang datang dengan sukarela membantu para tunagrahita dalam kegiatan usaha pemberdayaan. Hingga saat ini, LKS rumah Harapan Mulya mempunyai 10 pendamping serta 12 volunteer dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan.

Berdasarkan keterangan tersebut, maka terkait indikator-indikator pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi untuk mengukur efektifitas pemberdayaan di LKS Rumah Harapan Mulya sudah berjalan efektif. Walaupun masih ada beberapa kendala atau masalah yaitu sumber daya manusia dari beberapa tunagrahita yang masih kurang, serta sarana dan prasarana yang perlu ditambah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang efektivitas program pemberdayaan ekonomi keluarga tunagrahita dalam konsep *Sustainable Development Goals* di desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemberdayaan ekonomi keluarga tunagrahita dilakukan di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Rumah Harapan Mulya dengan melakukan berbagai kegiatan, seperti pelatihan, keterampilan, serta pembinaan. Adapun dalam hal pengembangan pemberdayaan ekonomi keluarga tunagrahita, LKS Rumah Harapan Mulya melakukan berbagai upaya seperti penguatan modal, pelatihan usaha, penguatan pendampingan, serta penguatan pemasaran hasil dari keterampilan warga tunagrahita. Dalam pelaksanaan pemberdayaan terdapat kendala yang dihadapi yakni komunikasi dan kemauan dari warga tunagrahita.
2. Dengan adanya pemberdayaan memberikan dampak ekonomi yang dirasa cukup pada keluarga tunagrahita. Dengan pelatihan tersebut warga tunagrahita mempunyai kegiatan dan keterampilan yang dapat menghasilkan pendapatan. Beberapa dampak yang didapat warga tunagrahita diantaranya: pertama, warga tunagrahita memiliki pendapatan dengan 3 konsep, yakni harian, triwulan, dan tahunan. Kedua, kemampuan

mobilitas. Ketiga, partisipasi dalam kehidupan sosial. Keempat, terpenuhinya gizi dan dapat memutus rantai tunagrahita.

3. Berdasarkan pengukuran efektivitas pemberdayaan ekonomi keluarga tunagrahita menggunakan 3 (tiga) pendekatan menurut Richard M. Steers, maka pelaksanaan pemberdayaan ekonomi keluarga tunagrahita dalam meningkatkan SDGs di desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dapat dikategorikan cukup efektif. Ukuran efektivitas pertama pencapaian tujuan, dilihat dari kurun waktu dan sasaran pemberdayaan sudah tepat. Hal ini terbukti selama kurang lebih 10 tahun kegiatan pemberdayaan ini dilaksanakan warga tunagrahita saat ini sudah mempunyai kegiatan dan keterampilan yang dapat menghasilkan pendapatan. Kedua integrasi, dilihat dari prosedur dan proses sosialisanya, para pelaksana pemberdayaan serta pendamping dan volunteer sudah melaksanakan tugasnya dengan baik walaupun masih kurang matang dalam hal persiapan maupun pelaksanaannya. Ketiga adaptasi, dilihat dari seg adaptasinya atau kemampuan penyesuaiannya, warga tunagrahita serta masyarakat setempat mampu menyesuaikan diri dengan program pemberdayaan di LKS Rumah Harapan Mulya serta dapat mengikuti semua kegiatan pelatihan yang diadakan.

B. Saran-saran

Warga penyandang tunagrahita bukan merupakan beban, mereka bisa hindup mandiri untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Tindakan yang perlu dilakukan oleh masyarakat normal adalah dengan memberikan

dukungan dan motivasi agar warga tunagrahita dapat bertahan hidup. Dukungan tersebut tidak harus berupa bantuan konsumtif saja melainkan bantuan sosial pemberdayaan juga sangat penting. Maka dari itu, penulis sebagai peneliti dalam kasus pemberdayaan ekonomi keluarga tunagrahita memberikan saran agar:

1. Bagi pengurus LKS Rumah Harapan Mulya, sebagai lembaga pemberdayaan ekonomi keluarga tunagrahita untuk lebih mengembangkan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan potensi baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya, serta memperluas jaringan pemasaran hasil keterampilan warga tunagrahita. Hal ini bisa dilakukan melalui pedagang-pedagang lain atau dengan mengoptimalkan kerjasama dari potensi wisata yang ada di ponorogo.
2. Bagi pemerintah setempat, khususnya pemerintah desa dan kabupaten hendaknya memberikan pelayanan seperti kesehatan, pendidikan, serta kemasyarakatan yang mudah dan tidak menyulitkan kepada mereka khususnya masyarakat dengan penyandang keterbelakangan mental atau tunagrahita.
3. Bagi peneliti selanjutnya, dapat meneruskan penelitian terkait pengembangan hasil pemberdayaan ekonomi keluarga tunagrahita, terutama pada dampak adanya pemberdayaan ekonomi terhadap berkurangnya penyandang tunagrahita karena masalah gizi yang buruk.

Daftar Pustaka

- Ach Wazir Ws, *Panduan Penguatan Manajemen Lembaga Swadaya Masyarakat*, Jakarta: Sekretariat Bina Desa: 1999.
- Achmadi, Abu Dan Cholid Narkubo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 2006.
- Agustinus Ionga Tiza, Implementasi Program Pembangunan Desa Mandiri Anggaran Untuk Rakyat Menuju Sejahtera (Anggar Merah) Di Kabupaten Timor Tengah Utara, Tesis Magister, Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Univ Brawijaya Malang, 2014.
- Amila, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Tunagrahita Melalui Kelompok Swadaya Masyarakat Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit, Tesis Magister, (Malang: Program Magister Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.
- Arianto, Zaki, *Upaya Pemerintahan Joko Widodo Dalam Mendorong Implementasi Sustainable Development Goals Di Indonesia. 2.*
- Arifin, Zainal *Penelitian Pendidikan Metode Dan Paradigma Baru* (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2012.
- Basrowi Dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2008.
- Bugin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis Dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Diah Restu Nur Hasanah, Analisis Model Peberdayaan Masyarakat Pada Warga Tunagrahita Di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, Skripsi Febi Iain Ponorogo, 2020.
- Etika Khairina, Eko Priyo Purnomo & Ajree Ducol Malawani, *Sustainable Development Goals: Kebijakan Berwawasan Lingkungan Guna Menjaga*

- Ketahanan Lingkungan Dikabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 26, No. 2, Agustus 2020,
- Fardan Ngoyo, Muhammad, Mengawal Sustainable Development Goals (Sdgs); Meluruskan Orientasi Pembangunan Yang Berkeadilan, *Jurnal Sosioreligius* Vol. 1 No. 1 Juni 2015.
- Hadi Susanto, Hanafi, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kampung Idiot Karangpatihan Balong Ponorogo*, Joie: *Jurnal Of Islamic Economics*, Vol 1, Nomor 1, Januari-Juni 2021.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1991.
- Ishartano & Raharjo, T.S. (2016). Sustainable Development Goals Dan Pengentasan Kemiskinan. *Social Work Jurnal*, 6(2)
- J. Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2009.
- Jamasy, Owin, *Keadilan, Pemberdayaan Dan Penanggulangan Kemiskinan*, Jakarta: Belantik, 2004.
- Kurniawan, Agung, *“Transformasi Pelayanan Public”*, Jogjakarta: Pembaruan, 2005.
- M. Richard Steers, Terj: Magdalena Jamin, *Efektivitas Organisasi*, Jakarta: Erlanga, 1980.
- Mangkunegara, *“Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan”*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Oktaviani Musri, Ayu , *Pelaksanaan Program Sustainable Development Goals Sdgs Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Mengurangi Kemiskinan*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020, .31.
- Oktaviani Musri, Ayu, *Pelaksanaan Program Sustainable Development Goals (Sdgs) Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Mengurangi Kemiskinan*, Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial, Univ. Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020, 2.
- P. Siagian, Sondang, *“Kiat Meningkatkan Aktifitas Kerja”*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

- Payne, Malcolm, *Teori Pekerjaan Sosial Modern*, Terj. Susiladiharti, Yogyakarta: Samudra Biru, 2016.
- Prastowo, Joko, *Belajar Dari Masyarakat Best Practices Program Kuliah Kerja Nyata Pelajaran Pemberdayaan Masyarakat Lppm Ugm*, (Bantul: Samudera Biru, 2010).
- Rany An Nisaa Syabrina, “Efektivitas Dan Efisiensi Komunikasi Pada Penyelenggaraan Damar Kurung Gresik Tahun 2017”, *Unair Repository*, Juni, 2018.
- Salsiah Alisjahbana, Armida Dan Endah Murniningtyas, *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia: Konsep Target Dan Strategi Implementasi*, Cetakan 2, (Unpaad Press: Bandung, 2018
- Sarifudin, Ahmad, *Analisis Penerapan Konsep Sustainable Development Goals Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi (Lampung: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2021).
- Sedarmayanti, “Manajemen Sumber Dya Manusia, Reformasi, Birokrasi Dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil”, Bandung: Aditama, 2009.
- Setianingsih, Retno, *Pemodelan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 2019.
- Soekanto, Soerjono *Sosiologi Suatu Penganta*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Soetomo, *Kesejahteraan Dan Upaya Mewujudkannya Dalam Perspektif Masyarakat Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Suharto, Edi, *Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri: Memperkuat Tanggngjawab Sosial Perusahaan*, Cetakan 1, (Bandung: Pt Reifka Aditama, 2007.
- Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Supriyono, “*Sistem Pengendalian Manajemen*”, Semarang: Universitas Diponegoro, 2000.

- Surwanti, Arni, Model Pemberdayaan Ekonomi Penyandang Disabilitas Di Indonesia, (Jurnal Manajemen Dan Bisnis; Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol. 5, 1, Maret 2014.
- Taliziduhu Ndraha, *Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta:Rineka Cipta, 2002.
- Teguh Sulistiyani, Ambar, *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*, Yogyakarta: Gava Media, 2017.
- Theresia, Aprillia, Dkk, *Pembangunan Berbasis Masyarakat, Acuan Bagi Praktisi, Akademisi, Dan Pemerhati Pembangunan Masyarakat Bandung*: Alfabeta, 2015.
- Totok Mardikanto Dan Purwoko Soebianto. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung : Alfabeta, 2012.
- Widjajanti, Kesi, Model Pemberdayaan Masyarakat, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Semarang, 2011.
- Winarni, Tri. Memahami Pemberdayaan Masyarakat Desa Partisipatif Dalam Orientasi Pembangunan Masyarakat Desa Menyongsong Abad 21: Menuju Pemberdayaan Pelayanan Masyarakat, Yogyakarta: Aditya Media. 1998.
- Yasinta Serena, Maria, Upaya Mengatasi Kemiskinan Desa Melalui Program Sustainable Development Goals (Sdgs) (Studi Pada Kantor Desa Karang Bnayan Kecamatab Langsar Kab. Lombok Barat) Skripsi, Fispol Univ. Muhammadiyah Mataram 2022.
- Zubaedi, *Wacana Pembangunan Alternatif*, Yogyakarta: Arruzz Media Group, 2007.